



BUPATI SIKKA

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2025
(IKU SESUAI RPJMD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026)**



**MAUMERE
TAHUN 2026**



JUVENTUS PRIMA YORIS KADO **SIMON SUBANDI SUPRIADI**
 BUPATI SIKKA WAKIL BUPATI SIKKA



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sikka tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat dan stakeholder, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sikka Tahun 2025 ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat pada tahun selanjutnya.

Maumere, Maret 2026

Wakil Bupati Sikka,

SIMON SUBANDI SUPRIADI

PARAF HIERARKI		
Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten Administrasi Umum		
Kepala Bagian Organisasi		
Analisis Kebijakan Ahli Muda		

DAFTAR ISI

	HALAMAN
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Grafik.....	xiii
Ikhtisar Eksekutif.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Sikka.....	2
1.4. Perangkat Daerah.....	13
1.5. Sumber Daya Aparatur.....	15
1.6. Sumber Daya Keuangan.....	18
1.7. Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Sikka.....	20
1.8. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja.....	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	23
2.1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.....	23
2.2 Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.....	37
2.3 Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025.....	73
2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025.....	76
2.5 Keselarasan Indikator Kinerja Utama pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024- 2026 terhadap Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah.....	91
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	94
3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka.....	96

3.2 Realisasi anggaran	288
BAB IV PENUTUP	301
LAMPIRAN	
a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	
b. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025	

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1.1 Jumlah Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Sikka	3
Tabel 1.2 Nama Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan Tahun 2025.....	5
Tabel 1.3 Nama sungai di Kabupaten Sikka	8
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2025.....	8
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin Tahun 2025.....	10
Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2025.....	11
Tabel 1.7 Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2025.....	12
Tabel 1.8 Jumlah PNS menurut jabatan	15
Tabel 1.9 Jumlah PNS menurut tingkat jabatan	15
Tabel 1.10 Jumlah ASN (PNS & PPPK) menurut jenjang pendidikan	15
Tabel 1.11 Jumlah PNS menurut golongan	16
Tabel 1.12 Jumlah PPPK menurut golongan	16
Tabel 1.13 Jumlah PPPK berdasarkan Tingkat Jabatan	17
Tabel 1.14 Jumlah ASN (PNS & PPPK) menurut jenis kelamin	17
Tabel 1.15 Jumlah PNS menurut usia	17
Tabel 1.16 Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun 2025.....	19
Tabel 2.1 Strategi	25
Tabel 2.2 Arah Kebijakan	34
Tabel 2.3 Keselarasan Indikator Kinerja Utama.....	92
Tabel 3.1 Kategori Penilaian Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama	95
Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	97

Tabel 3.3	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024	101
Tabel 3.4	Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026..	106
Tabel 3.5	Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan daerah lain	110
Tabel 3.6	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan/ IKU IPM Tahun 2025	115
Tabel 3.7	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU IPM	116
Tabel 3.8	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU IPM sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	116
Tabel 3.9	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU RLS (Rata-Rata Lama Sekolah).....	119
Tabel 3.10	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	120
Tabel 3.11	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	121
Tabel 3.12	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU HLS (Harapan Lama Sekolah)	124
Tabel 3.13	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 IKU HLS (Harapan Lama Sekolah)	124
Tabel 3.14	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU HLS sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	125
Tabel 3.15	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).....	128
Tabel 3.16	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	128
Tabel 3.17	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU IPLM sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat	

	dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	129
Tabel 3.18	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU UHH (Usia Harapan Hidup)	131
Tabel 3.19	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU UHH (Usia Harapan Hidup)	132
Tabel 3.20	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU UHH sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	132
Tabel 3.21	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	134
Tabel 3.22	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	135
Tabel 3.23	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Tingkat Pengangguran Terbuka sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	135
Tabel 3.24	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	137
Tabel 3.25	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	137
Tabel 3.26	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU IKU IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	138
Tabel 3.27	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	140
Tabel 3.28	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	141
Tabel 3.29	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	141
Tabel 3.30	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU TFR (Total Fertility Rate)	143

Tabel 3.31	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU TFR (Total Fertility Rate)	144
Tabel 3.32	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU TFR (Total Fertility Rate) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 -2026	144
Tabel 3.33	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	146
Tabel 3.34	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah	147
Tabel 3.35	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.	148
Tabel 3.36	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 Indikator tujuan/ IKU Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah.....	149
Tabel 3.37	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	150
Tabel 3.38	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	151
Tabel 3.39	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Indeks Inovasi Daerah	152
Tabel 3.40	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Inovasi Daerah	153
Tabel 3.41	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Indeks Inovasi Daerah sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 - 2026	153
Tabel 3.42	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	154

Tabel 3.43	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	155
Tabel 3.44	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU IKU Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026..	155
Tabel 3.45	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Persentase Pemuda Pelopor	156
Tabel 3.46	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Persentase Pemuda Pelopor	157
Tabel 3.47	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU IKU Persentase Pemuda Pelopor sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	158
Tabel 3.48	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Pengeluaran Per Kapita	158
Tabel 3.49	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Pengeluaran Per Kapita	159
Tabel 3.50	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Pengeluaran Per Kapita sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	159
Tabel 3.51	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Pertumbuhan Ekonomi	159
Tabel 3.52	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Pertumbuhan Ekonomi	162
Tabel 3.53	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Pertumbuhan Ekonomi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	162
Tabel 3.54	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Jumlah Nilai Investasi.....	165
Tabel 3.55	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Jumlah Nilai Investasi	165
Tabel 3.56	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Jumlah Nilai Investasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah	

	yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	166
Tabel 3.57	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Derajat Desentralisasi fiskal	167
Tabel 3.58	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Derajat Desentralisasi fiskal .	168
Tabel 3.59	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Derajat Desentralisasi fiskal sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	168
Tabel 3.60	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Persentase Penduduk Miskin	171
Tabel 3.61	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Persentase Penduduk Miskin	172
Tabel 3.62	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Persentase Penduduk Miskin sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	172
Tabel 3.63	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka, dengan Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT dan Persentase Penduduk Miskin Nasional	173
Tabel 3.64	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar.....	175
Tabel 3.65	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Persentase PPKS Yang Memperoleh Bansos Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar.....	175
Tabel 3.66	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Persentase PPKS Yang Memperoleh Bansos Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	176
Tabel 3.67	Rentang Nilai Indeks Desa Membangun	179
Tabel 3.68	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Indeks Desa Membangun	180

Tabel 3.69	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU IDM (Indeks Desa Membangun)	180
Tabel 3.70	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU IDM (Indeks Desa Membangun) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.....	181
Tabel 3.71	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah	183
Tabel 3.72	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026..	184
Tabel 3.73	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar).....	185
Tabel 3.74	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar).....	185
Tabel 3.75	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.....	186
Tabel 3.76	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	187
Tabel 3.77	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 Indikator Tujuan/ IKU IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup).....	188
Tabel 3.78	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.....	189
Tabel 3.79	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Indeks Resiko Bencana	190
Tabel 3.80	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Resiko Bencana	191
Tabel 3.81	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Indeks Resiko Bencana sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.....	192
Tabel 3.82	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sikka dengan IRB Kabupaten Flores Timur dan IRB Kabupaten Ende.....	192

Tabel 3.83	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Indeks Reformasi Birokrasi	196
Tabel 3.84	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Reformasi Birokrasi ..	196
Tabel 3.85	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IIKU Indeks Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	197
Tabel 3.86	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU SAKIP	199
Tabel 3.87	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU SAKIP	199
Tabel 3.88	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU SAKIP sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	199
Tabel 3.89	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Opini BPK.....	200
Tabel 3.90	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Opini BPK.....	201
Tabel 3.91	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Opini BPK sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	201
Tabel 3.92	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Indeks Kualitas Kebijakan Publik	203
Tabel 3.93	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Kualitas Kebijakan Publik	203
Tabel 3.94	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IIKU Indeks Kualitas Kebijakan Publik sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	204
Tabel 3.95	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024IKU Survey Kepuasan Masyarakat	205
Tabel 3.96	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU IKM Survey Kepuasan Masyarakat.....	205
Tabel 3.97	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IIKU Survey Kepuasan Masyarakat sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka	

	menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	206
Tabel 3.98	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	207
Tabel 3.99	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	210
Tabel 3.100	Realisasi anggaran menurut program prioritas pembangunan	288
Tabel 3.101	Laporan Realisasi Anggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Konsolidasi)	298

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Sikka	6
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sikka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022	14
Gambar 3.1. Profil Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2025	171

DAFTAR GRAFIK

	HALAMAN
Grafik 3.1 Perbandingan IPM Kabupaten Sikka dengan IPM Kabupaten Flores Timur, IPM Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, IPM Provinsi NTT serta IPM Nasional	117
Grafik 3.2 IPM Kabupaten Sikka Tahun 2023 - 2025	118
Grafik 3.3 RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) Kabupaten Sikka Tahun 2023-2025	120
Grafik 3.4 Perbandingan RLS Kabupaten Sikka dibandingkan dengan RLS Kabupaten Flores Timur, RLS Kabupaten Ende, RLS Kabupaten Kupang, RLS Provinsi NTT dan RLS Nasional	122
Grafik 3.5 HLS Kabupaten Sikka Tahun 2023 - 2025	125
Grafik 3.6 Perbandingan HLS Kabupaten Sikka dibandingkan dengan HLS Kabupaten Flores Timur, HLS Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang dan HLS Provinsi NTT serta HLS Nasional	126
Grafik 3.7 IPLM Kabupaten Sikka Tahun 2023- 2025	129
Grafik 3.8 Perbandingan IPLM Kabupaten Sikka dengan IPLM Kabupaten Flores Timur, IPLM Kabupaten Ende, IPLM Kabupaten Kupang, IPLM Provinsi NTT dan IPLM Nasional	130

Grafik 3.9	UHH Kabupaten Sikka dibandingkan dengan UHH Kabupaten Flores Timur, UHH Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang dan UHH Provinsi NTT serta UHH Nasional	133
Grafik 3.10	Perbandingan TPT Kabupaten Sikka, TPT Kabupaten Flores Timur, TPT Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, TPT Provinsi NTT serta TPT Nasional Tahun 2025	136
Grafik 3.11	Perbandingan IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Sikka dengan IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Provinsi NTT serta IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Nasional Tahun 20PM Kabupaten Ende, IPM Provinsi NTT serta IPM Nasional Tahun 2025.....	142
Grafik 3.12	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sikka dengan Indeks Development Gender (IDG) Kabupaten Flores Timur, Indeks Development Gender (IDG) Kabupaten Ende, Indeks Development Gender (IDG) Kabupaten Kupang dan Indeks Development Gender (IDG) Provinsi NTT Tahun 2025	142
Grafik 3.13	Perbandingan TFR (Total Fertility Rate) Kabupaten Sikka Kabupaten Sikka dan TFR (Total Fertility Rate) Nasional Tahun 2025	145
Grafik 3.14	Perbandingan IKU Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2025.....	153
Grafik 3.15	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Pengeluaran Per Kapita sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	160
Grafik 3.16	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2023- 2025.....	161
Grafik 3.17	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende dan Provinsi NTT serta Pertumbuhan Ekonomi Nasional	163
Grafik 3.18	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Jumlah Nilai Investasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026	166
Grafik 3.19	Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Derajat Desentralisasi fiskal sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.....	169
Grafik 3.20	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Sikka Tahun 2023-2025 ..	170
Grafik 3.21	Persentase PPKS yang memperoleh bansos Tahun 2023-2025	174
Grafik 3.22	Perkembangan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Sikka Tahun 2023-2025	181

Grafik 3.23	Perkembangan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Tahun 2023-2025.....	188
-------------	---	-----



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
INSPEKTORAT DAERAH
JLN. ELTARI NO.01 TELP./FAX. (0382) 21296
MAUMERE

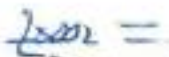
PERNYATAAN TELAH DIREVU
ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2025

Kami telah merevisi Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 sesuai Pedoman Revisi atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pemerintah Kabupaten Sikka. Revisi bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan revisi kami, terdapat kondisi atau hal-hal yang menjadi catatan untuk perbaikan sehingga mempengaruhi keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Maumere, 7 April 2026

INSPEKTUR KABUPATEN SIKKA,


Germanus Goleng, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.19670919 199903 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap pimpinan daerah WAJIB menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyelenggaraan SAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka sebagai informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan Perencanaan kinerja Tahunan yang dimuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025.

Capaian kinerja pada Tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan kinerja sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024-2026 berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023, lebih lanjut dijabarkan dalam Keputusan Bupati Sikka Nomor 682 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sikka dan sebagai bentuk wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menyempurnakan aspek pelaporan kinerja, sebagaimana rekomendasi Kemenpan-RB dalam LHE SAKIP Tahun 2025.

Capaian Kinerja Organisasi disajikan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sikka telah dilakukan melalui analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024;

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024- 2026;
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional,
5. Melakukan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Melakukan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Melakukan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024- 2026 menurut Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 terdiri atas 30 Indikator (4 Indikator Tujuan dan 26 Indikator Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas setiap pernyataan kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel : Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
I	MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING SDM	IPM	Indeks	67.00	73.37	109.51
1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	8.97	9.39	104.68
		HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15.51	16.17	104.26
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	13.00	48.66	374.31
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	68.02	74.24	109.14

	Masyarakat					
1.3	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.45	2.33	147.64
1.4	Meningkatnya kesetaraan, keadilan Gender dan Kualitas Keluarga	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	89.20	86.73	74.81
		IDG (Indeks Development Gender)	Indeks	62.57	89.87	143.63
		TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2.58	2.19	84.88
1.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	Nilai Rasio	0.53	1.18	222.64
1.6	Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	%	75.00	100	133.33
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65.00	49.35	75.92
					KURANG INOVATIF	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	70.00	63.51	90.73
1.7	Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olahraga	Persentase pemuda pelopor	%	70.00	57.40	82.00
II	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	1,015,646.17	93,632.42	9.219
2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.04	4.28	105.94

		Jumlah Nilai Investasi	Juta Rupiah	220	65	29.55
		Derajat Desentralisasi Fiskal	%	10.89	10.67	97.98
2.2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	11.69	11.25	96.24
2.3	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	57.95	97.26	167.84
2.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	IDM (Indeks Desa Membangun)	Indeks	0.65	0.67	102.71
III	PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS LINGKUNGAN	Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah	Nilai	13.00	14.33	89.77
3.1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	Indeks	57.61	56.79	98.58
3.2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	71.70	80.66	112.50
3.3	Terwujudnya pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	123.38	138.41	87.82
IV	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	B	111.48
4.1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	SAKIP	Nilai	B	B	101.30
				60.00	60.78	101.30
4.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100.00

4.3	Meningkatnya kualitas kebijakan publik.	Indeks Kualitas kebijakan Publik	Indeks	2.18	52.65	2415.14
4.4	Meningkatnya Pelayanan Publik.	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	3.50	3.33	95.14
			Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja			189.29

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa pencapaian dari 4 tujuan dengan 4 Indikator Tujuan, 2 indikator telah tercapai dengan nilai capaian 100% keatas dan 2 indikator belum tercapai atau dengan nilai dibawah 100%. Namun demikian secara keseluruhan indikator tujuan tersebut masih masuk dalam kategori Sangat Baik atau dengan nilai 189.29%, dan jika dirata-rata capaian kinerja dari 4 indikator tersebut sebesar 79.99%. Jika dijumlah secara keseluruhan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja sasaran dinilai Sangat Memuaskan, 22 (dua puluh dua) indikator kategori sangat memuaskan, 2 (dua) indikator dalam kategori memuaskan, 2 (dua) indikator dalam kategori sangat baik. Dan jika dirata-rata capaian kinerja dari 30 indikator tersebut sebesar 189.29%. Dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran sesuai tujuan Kabupaten Sikka pada tahun 2025, telah didukung dengan anggaran sebesar Rp.270.243.986.520 dan terealisasi sebesar Rp.250.482.863.784 atau tercapai 92.69% yang terbagi dalam 116 Program kegiatan. Dengan demikian jika dibandingkan dengan capaian rata-rata kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 189.29%, maka didapat efisiensi sumber daya anggaran sebesar 7,31% sehingga dapat disimpulkan bahwa program-program tersebut sangat mendukung ketercapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

Secara umum capaian indikator sasaran sebagaimana ditargetkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024-2026, mengalami keberhasilan, dengan kategori Sangat Memuaskan. Keberhasilan ini akan di pertahankan dan ditingkatkan kedepannya. Tentunya keberhasilan ini menunjukkan perkembangan yang baik, sebagai hasil dari komitmen, kerja keras dan perhatian baik dari Pemerintah Kabupaten Sikka maupun keterlibatan perangkat daerah serta seluruh masyarakat Kabupaten Sikka. Terhadap indikator yang belum mencapai

target akan menjadi perhatian dalam pencapaiannya untuk dilakukan perbaikan dan evaluasi untuk peningkatan di tahun akan datang.

Maumere, 11 April 2025


JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO, S.H

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Pelaporan kinerja yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 merupakan capaian kinerja tahun pertama dari Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024-2026. Dalam menyelenggarakan SAKIP Pemerintah Kabupaten Sikka telah menyusun beberapa dokumen antara lain :

1. Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023
2. Keputusan Bupati Sikka Nomor 682 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025
4. Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2025
5. Pelaporan kinerja disajikan dalam dokumen ini.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 MAKSUD

- a. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan akuntabel;
- b. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama tahun anggaran 2025 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2.2 TUJUAN

- a. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka selama tahun anggaran 2025 yang mana tahun ini merupakan tahun pertama dari Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024-2026;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka di tahun 2025 dan sebagai bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja di tahun berikutnya;
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sikka dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel

1.3 GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

1.3.1 Data Geografis Wilayah

A. Keadaan Geografis

Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di daratan Flores, dengan luas wilayah 1.731,91 Km² atau 173.191 Ha. dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ende;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Sawu.

Secara geografis Kabupaten Sikka terletak antara 80 22' LS sampai dengan 80 50' LS dan 121° 55' 40" BT sampai 122° 41' 30" BT. Secara administratif Kabupaten Sikka terbagi atas 21 Kecamatan, 13 Kelurahan,

dan 181 Desa dengan luas wilayah masing-masingnya dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Desa, Kelurahan, dan Kecamatan di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	
1	Paga	1	Wolowiro
		2	Mauloo
		3	Mbengu
		4	Paga
		5	Lanandreta
		6	Masebawa
		7	Wolorega
2	Mego	1	Korobhera
		2	Dobo
		3	Bera
		4	Wolodhesa
		5	Gera
		6	Liakufu
3	Tanawawo	1	Bu Selatan
		2	Detubinga
		3	Bu Utara
		4	Bu Batuweti
		5	Loke
4	Lela	1	Kolidetung
		2	Korowuwu
		3	Hepang
		4	Lela
		5	Watutedang
5	Bola	1	Hokor
		2	Wolonwalu
		3	Wolokoli
		4	Bola
6	Doreng	1	Wolomotong
		2	Kioangpopot
		3	Waturerak
		4	Wogalirit
		5	Waihawa
7	Mapitara	1	Natakoli
8	Talibura	2	Hebing
		1	Nangahale
		2	Talibura
		3	Darat Gunung
		4	Darat Pantai
		5	Nebe
		6	Hikong



7	Kringa	16	Likonggete
8	Ojang	17	Watuomok
9	Wailamung	18	Watubaing

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan			
9	Waigete	19	Baokremot	20	Waipaar
		1	Pogon	7	Wairerang
		2	Aibura	8	Watudiran
		3	Wairbleier	9	Runut
		4	Hoder	10	Egon Buluk
		5	Egon	11	Mahe Kelan
10	Walblama	6	Nangatobong		
		1	Natarmage	5	Ilinmedo
		2	Pruda	6	Tua Bao
		3	Werang	7	Watumoning
11	Kewapante	4	Tanarawa		
		1	Umagera	6	Waiara
		2	Ian Tena	7	Geliting
		3	Kopong	8	Wairkoja
		4	Seusina	9	Watukobu
12	Hewokioang	5	Namangkewa		
		1	Hewokioang	5	Kajowair
		2	Heopual	6	Baomekot
		3	Wolomapa	7	Munerana
13	Kangae	4	Rubit		
		1	Teka Iku	6	Tanaduen
		2	Mekendetung	7	Watuliwung
		3	Blatatin	8	Habi
		4	Kokowahor	9	Langir
14	Paive	5	Watumilok		
		1	Nitunglea	5	Kesokoja
		2	Lidi	6	Ladolaka
		3	Reruwairere	7	Tuanggeo
15	Koting	4	Maturiwu	8	Rokirole
		1	Koting A	5	Ribang
		2	Koting B	6	Paubekor
		3	Koting C	7	Watu Repa
16	Nelle	4	Koting D		
		1	Nelle Wutung	4	Nelle Berat
		2	Nelle Lorang	5	Nelle Urung
17	Nita	3	Manubura		
		1	Tilang	9	Ladogahar
		2	Lusitada	10	Ririt
		3	Bloro	11	Nirangkiliung
		4	Tebuk	12	Mahebora
		5	Nita	13	Nangablo
		6	Takaplager	14	Tadalado Jalo
		7	Nitakioang	15	Karakabu

18	Magepanda	8	Wuliwutik		
		1	Kolosia	5	Done
		2	Magepanda	6	Waturia
		3	Reroroja	7	Woda Mude
19	Alok	4	Kolosia B Woda	8	Legu Woda
20	Alok Barat	1	Kota Uneng	5	Pemana
		2	Nangalimang	6	Gunung Sari
		3	Madawat	7	Semparong
		4	Kabor		
21	Alok Timur	1	Wuring	3	Wailiti
		2	Hewuli	4	Wolomarang
		3	Nangameting	9	Parumaan
		4	Wairotang	10	Lepolima
		5	Waioti	11	Gong Bekor
		6	Watugong		

Sumber Data: DPMD Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa wilayah administrasi Kabupaten Sikka terdiri dari 21 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 181 Desa. Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak terdapat di Kecamatan Talibura sebanyak 20 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Mapitara dan Alok Barat masing-masing sebanyak 4 desa/kelurahan.

Adapun nama ibu kota kecamatan dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Nama Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan

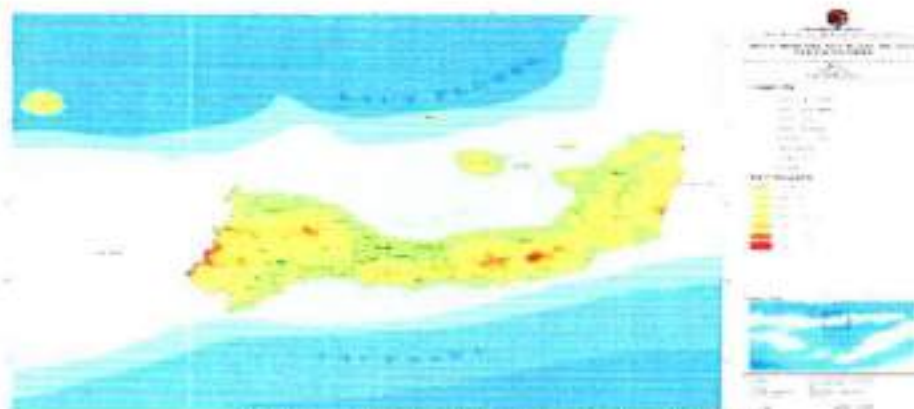
No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (km ²)
1	Paga	Paga	76,23
2	Tanawawo	Wolofeo	81,52
3	Mego	Lekebai	100,59
4	Lela	Lela	45,47
5	Bola	Bola	43,97
6	Doreng	Edat	54,43
7	Mapitara	Hebing	83,28
8	Talibura	Talibura	273,07
9	Waiblama	Tanarawa	141,28
10	Waigete	Waigete	226,76
11	Kewapante	Kewapante	22,89
12	Hewokloang	Bacwunut	19,33
13	Kangae	Waipare	39,24
14	Nelle	Nelle Urung	13,42
15	Koting	Koting B	16,62

16	Palue	Uwa	38,46
17	Nita	Nita	117,27
18	Magepanda	Magepanda	130,10
19	Alok	Kota Uneng	19,37
20	Alok Barat	Wailiti	48,84
21	Alok Timur	Waioti	74,46
Jumlah			1 675,36

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2025

Berdasarkan data luas wilayah per kecamatan di atas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Talibura dengan luas wilayah 273,07Km², sedangkan kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Nelle 13,42 Km². Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Sikka



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka Tahun 2025

B. Klimatologis

Klimatologis merupakan gambaran dan penjelasan sifat iklim di suatu wilayah yang terdiri dari komponen suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, curah hujan, dan hari hujan. Kabupaten Sikka dikelilingi oleh Laut Flores dan Laut Sawu dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Wilayah di Kabupaten Sikka memiliki suhu yang cenderung panas. Suhu tertinggi di 36,20 °C dan suhu terendah di 20,50 °C sedangkan curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember 2025 sebesar 174,40 mm.

C. Hidrologi

Hidrologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang kualitas air sekaligus distribusinya di seluruh wilayah. Kondisi hidrologi Kabupaten Sikka dapat dijelaskan bahwa potensi sumber air di wilayah Kabupaten dapat diidentifikasi dari 3 (tiga) sumber yaitu air hujan, air tanah dan air permukaan.

1. Air Hujan

Sumber air hujan di wilayah Kabupaten Sikka dipengaruhi oleh iklim dan curah hujan. Pada umumnya kondisi iklim di wilayah ini dipengaruhi oleh angin muson yang mengakibatkan kering, dengan musim hujan yang pendek yang jatuh pada sekitar bulan November hingga Mei. Akibat rendahnya curah hujan dan sedikitnya hari hujan sangat mempengaruhi keadaan air tanah dan keadaan debit air sungai yang ada di wilayah Kabupaten Sikka.

2. Air Tanah

Struktur batuan geologi wilayah Kabupaten Sikka sangat mempengaruhi terhadap potensi air tanah, batuan yang terdapat di wilayah ini, yaitu batuan gunung api kuarter dan alluvial, secara umum menunjukkan potensi air tanah yang baik. Struktur hidrogeologi wilayah ini cenderung kompleks dan sangat dipengaruhi oleh aktivitas tektonik dan vulkanik pada masa lampau. Aliran air tanah mengalir melalui celah antar butir (pasir dan butiran batu halus), mengalir di antara retakan dan celah batuan keras, aliran melalui celah, retakan dan saluran. Sumber air tanah ini sangat dipengaruhi oleh produktifitas aquifernya.

Menurut (Jones, 2018) diketahui bahwa kedalaman muka air tanah sangat dalam dibagian Tenggara daerah penelitian yaitu wilayah Kopong, Kecamatan Kewapante dan dangkal dibagian Barat Laut daerah penelitian yaitu wilayah Kolisia sampai wilayah Magepanda. Kedalaman muka air tanah ini mengikuti keadaan topografi daerah setempat, wilayah potensi air tanah sedang - tinggi dengan debit aliran berkisar 8.47 – 17.05 liter/detik meliputi wilayah Kecamatan Magepanda dan Bagian Barat Kecamatan Alok Barat dan wilayah potensi air tanah kecil – sedang dengan debit aliran berkisar 1.59 – 8.31 liter/detik meliputi wilayah Kecamatan Alok Barat, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Bagian Utara Kecamatan Nita, Nele dan Koting.

3. Air Permukaan

Air permukaan berasal dari air sungai-sungai yang berada di wilayah Kabupaten Sikka dalam skala kecil dan sedang. Iklim yang relatif kering dan musim hujan yang berlangsung hanya 3–4 bulan dalam setahun menyebabkan sungai-sungai tersebut juga banyak yang kering terutama pada musim kemarau. Pola aliran sungai di wilayah ini pada umumnya adalah dendritik, yaitu aliran sungai yang membentuk cabang pohon, berair pada musim hujan dan kering/berkurang debitnya pada musim kemarau. Berdasarkan data yang ada, jumlah sungai yang mengalir di wilayah ini hampir terdapat di semua kecamatan, tetapi pada umumnya hanya mengalir pada musim hujan. (Tatanan Transportasi Lokal Kabupaten Sikka, 2021). Nama-nama sungai di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3 Nama Sungai di Kabupaten Sikka		
No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Sungai Mati	60
2	Sungai Warlelau	70
3	Sungai Ili Getang	70
4	Sungai Nebe	80
5	Sungai Kaliwajo	51
6	Sungai Napun Gete	9,37
7	Sungai Mego	43
8	Sungai Kowi	39
Jumlah		422,37

Sumber: Balai Wilayah Sungai NT II, 2025

1.3.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Sikka selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kematian, kelahiran dan migrasi. Jumlah penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2025 sebanyak 345.319 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Menurut Kecamatan Tahun 2020-2025						
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Paga	16.715	16.798	16.801	17.308	17.656	17.379
Mego	13.257	13.408	13.489	13.816	14.522	13.953
Tanawawo	8.906	9.101	9.219	9.572	9.908	9.351

Lela	11.763	11.835	11.803	11.949	12.165	11.995
Bola	10.978	10.933	10.829	10.893	11.175	11.174
Doreng	12.100	12.228	12.085	12.382	12.803	12.842
Mapitara	6.702	6.792	6.726	7.022	7.412	7.094
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Waigete	25.570	25.866	26.171	26.998	27.659	27.289
Waiblama	8.353	8.395	8.308	8.536	8.929	8.923
Kewapante	14.696	14.872	14.918	15.334	15.612	15.992
Hewokloang	9.409	9.548	9.541	9.691	9.948	9.711
Kangae	18.313	18.444	18.545	19.039	19.451	19.572
Palue	9.363	9.417	9.449	9.874	10.258	9.824
Koting	6.403	6.506	6.513	6.751	6.786	6.835
Nelle	6.264	6.230	6.202	6.331	6.442	6.544
Nita	22.375	22.409	22.246	22.796	23.715	24.334
Magepanda	12.987	13.225	13.477	14.152	14.682	13.822
Alok	32.102	32.483	32.524	32.673	32.962	33.751
Alok Barat	22.321	22.661	22.993	23.890	24.548	26.438
Alok Timur	32.365	32.711	32.959	33.568	34.585	34.345
Jumlah	323.828	327.254	328.199	337.011	346.614	345.319

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2026

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 323.828 jiwa, tahun 2021 mencapai 327.254 jiwa, kemudian pada tahun 2022 mencapai 328.199 jiwa, tahun 2023 mencapai 337.011 jiwa, tahun 2024 mencapai 346.614 jiwa dan tahun 2025 mencapai 345.319 jiwa.

Rasio jenis kelamin (sex ratio) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (dependency ratio). Sex ratio Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel 1.5. di bawah ini:

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin(%)	Persentase Penduduk (%)
1.	Paga	94,7	5,03
2.	Mego	95,2	4,04
3.	Tanawawo	103,4	2,71
4.	Lela	92,9	3,47
5.	Bola	89,5	3,24
6.	Doreng	93,7	3,72
7.	Mapitara	96,5	2,05
8.	Talibura	93,7	7,02
9.	Waigete	95,2	7,90
10.	Waiblama	102,3	2,58
11.	Kewapante	88,6	4,63
12.	Hewokloang	91,5	2,81
13.	Kangae	91,0	5,67
14.	Palue	90,4	2,84
15.	Koting	95,7	1,98
16.	Nelle	90,9	1,90
17.	Nita	102,9	7,05
18.	Magepanda	93,1	4,00
19.	Alok	96,7	9,77
20.	Alok Barat	97,9	7,66
21.	Alok Timur	95,8	9,92
Total		95,1	100,00

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2026

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata sex ratio Kabupaten Sikka adalah sebesar 95,1 yang berarti dari 100 penduduk perempuan hanya terdapat 95 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jika diamati masing-masing kecamatan, maka terlihat bahwa sex ratio tertinggi terdapat di Kecamatan Tanawawo yaitu 103,4. Sementara itu, sex ratio paling rendah terdapat di Kecamatan Kewapante yaitu sebesar 88,6.

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 1.6. dibawah ini :

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2025

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk
Paga	17.379	1,23
Mego	13.953	1,60
Tanawawo	9.351	0,98
Lela	11.995	0,71
Bola	11.174	0,73
Doreng	12.842	1,43
Mapitara	7.094	1,30
Talibura	24.251	1,66
Waigete	27.289	1,92
Waiblama	8.923	2,13
Kewapante	15.992	1,66
Hewokloang	9.711	1,62
Kangae	19.572	1,71
Palue	9.824	0,72
Koting	6.835	0,98
Nelle	6.544	1,33
Nita	24.334	1,43
Magepanda	13.822	1,75
Alok	33.751	0,71
Alok Barat	26.438	3,65
Alok Timur	34.345	0,91
Total	345.319	1,49

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2025

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sikka sebesar 1.49. Dari 21 Kecamatan, semua kecamatan laju pertumbuhan penduduknya berada dibawah tingkat pertumbuhan.

D. Penduduk Menurut Agama

Komposisi penduduk menurut agama digunakan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kabupaten Sikka yaitu Katolik, Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel 1.7 di bawah ini;

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2025

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya	Jumlah
PAGA	836	34	16.877	5	-	-	1	17.753
MEGO	194	81	14.325	-	-	-	-	14.600
LELA	7	10	10.002	-	-	-	-	10.019
NITA	20	40	12.133	5	-	-	-	12.198
ALOK	8	24	11.142	-	1	-	-	11.175
PALUE	35	30	12.947	-	-	-	-	13.012
NELLE	12	15	7.505	-	-	-	-	7.532
TALIBURA	4.641	112	21.016	1	-	-	-	25.770
WAIGETE	464	156	27.416	-	-	-	-	28.036
KEWAPANTE	23	17	9.090	-	-	-	-	9.130
BOLA	1.430	230	14.169	4	8	-	-	15.841
MAGEPANDA	33	17	10.035	-	-	-	1	10.086
WAIBLAMA	1.210	277	18.287	6	1	-	-	19.781
ALOK BARAT	7	43	10.420	1	-	-	-	10.471
ALOK TIMUR	19	33	6.710	-	-	-	-	6.762
KOTING	26	42	6.310	7	-	-	-	6.385
TANAWAWO	60	83	23.666	-	-	-	-	23.809
HEWOKLOANG	1.485	80	13.364	1	-	-	-	14.930
KANGAE	10.383	1.186	21.735	40	21	1	-	33.366
DORENG	8.179	1.164	15.711	14	1	-	1	25.070
MAPITARA	7.242	2.208	25.408	96	32	1	-	34.989
	36.314	5.882	308.268	182	64	2	3	350.715

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk menurut agama yang dianut di Kabupaten Sikka berturut-turut dari yang terbanyak sebagai berikut: Katolik sebanyak 87,8970%, Islam sebanyak 10,3542%, Kristen sebanyak 1,6771%, Hindu sebanyak 0,0518% dan Budha sebanyak 0,0182% dan Khonghucu 0,0005% dan aliran kepercayaan sebanyak 0,0008%. Pada 21 kecamatan memiliki penduduk dengan agama yang dianut beragam. Walau adanya keberagaman agama di Kabupaten Sikka, akan tetapi kerukunan antar umat beragama senantiasa terjaga.

1.4 PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Perangkat Daerah Kabupaten Sikka yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka. Susunan Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2024 berjumlah 51 Perangkat Daerah yakni :

- 1). Sekretariat Daerah;
- 2). Sekretariat DPRD;
- 3). Inspektorat ;
- 4). 20 Dinas;
- 5). 6 Badan; dan
- 6). 21 Kecamatan,

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sikka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini :

1.5 SUMBER DAYA APARATUR

Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki sumber daya manusia dalam melaksanakan pembangunan. Jumlah PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebanyak 4.894 orang dengan rincian sebagai berikut:

1) Jumlah PNS menurut jabatan

Tabel 1.8
Jumlah PNS menurut jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH	PROPORSI
1	Eselon II	27	0.55
2	Eselon III A	57	1.16
3	Eselon III B	119	2.43
4	Eselon IV	296	6.05
5	Fungsional	3550	72.54
6	Pelaksana	845	17.27
Jumlah		4.894	100.00

Sumber Data : BKPSDM Daerah Kab. Sikka, 2026

2) Jumlah PPPK menurut tingkat jabatan pada tahun 2025

Tabel 1.9
Jumlah penerimaan PPPK menurut tingkat jabatan pada tahun 2025

NO.	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROPORSI
1	Guru	480	1.028	1.508	46.83
2	Kesehatan	93	492	585	18.17
3	Teknis	692	435	1.127	35.00
Jumlah		1.265	1.955	3.220	100

Sumber Data : BKPSDM Daerah Kab. Sikka, 2026

3) Jumlah ASN (PNS & PPPK) menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat pada tabel 1.10 berikut ini:

Tabel 1. 10
Jumlah ASN (PNS & PPPK) menurut jenjang pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	PPPK	JUMLAH	PROPORSI
1	SD	23	66	89	1.094
2	SLTP	29	-	29	0.357
3	SLTA	646	734	1.380	17.008
4	Diploma I	13	-	13	0.160
5	Diploma II	48	-	48	0.592
6	Diploma III	1.255	471	1.726	21.272

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	PPPK	JUMLAH	PROPORSI
7	Diploma IV	119	35	154	1.898
8	S-1	2.606	1.823	4.429	54.585
9	S-2	155	91	246	3.032
Jumlah		4.894	3.220	8.114	100.00

Sumber Data : BKPSDM Daerah Kab. Sikka, 2025

- 4) Jumlah PNS menurut golongan, dapat dilihat pada tabel 1.11 berikut ini:

Tabel 1. 11

Jumlah PNS menurut golongan

NO	GOLONGAN RUANG		JUMLAH	PROPORSI
1	GOLONGAN I	Juru Muda, I/a	16	0.327
		Juru Muda Tk. I, I/b		
		Juru, I/c		
		Juru Tk. I, I/d		
2	GOLONGAN II	Pengatur Muda, II/a	698	14.262
		Pengatur Muda Tk. I, II/b		
		Pengatur, II/c		
		Pengatur Tk. I, II/d		
3	GOLONGAN III	Penata Muda, III/a	3.623	74.029
		Penata Muda Tk. I, III/b		
		Penata, III/c		
		Penata Tk. I, III/d		
4	GOLONGAN IV	Pembina, IV/a &	557	11.381
		Pembina Tk. I, IV/b		
		Pembina Utama Muda, IV/c		
		Pembina Utama Madya, IV/d		
	Jumlah		4.894	100.00

Sumber Data : BKPSDM Daerah Kab. Sikka, 2025

- 5) Jumlah PPPK menurut golongan, dapat dilihat pada tabel 1.12 berikut ini:

Tabel 1. 12

Jumlah PPPK menurut golongan

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH	PROPORSI
1	Golongan I	66	2.050
2	Golongan V	734	22.795
3	Golongan VII	471	14.627
4	Golongan IX	1.858	57.702
5	Golongan X	91	2.826
	Jumlah	3.220	100.00

Sumber Data : BKPSDM Daerah Kab. Sikka, 2025

- 6) Jumlah PPPK berdasarkan Tingkat Jabatan (data Per 31 Desember 2025) sebanyak 3.220 orang yang diuraikan pada tabel 1.13 dibawah ini:

Tabel 1.13
Jumlah PPPK Berdasarkan Tingkat Jabatan

NO	Golongan	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROPORSI (%)
1	Guru	480	1028	1.508	46.83
2	Kesehatan	93	492	585	18.17
3	Teknis	692	435	1.127	35.00
	Jumlah	441	788	3.220	100.00

Sumber Data : BKPSDM Daerah Kab. Sikka, 2026

- 7) Jumlah ASN (PNS & PPPK) menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 1.14 berikut ini:

Tabel 1.14
Jumlah ASN (PNS & PPPK) menurut jenis kelamin

NO.	ASN	Laki-laki	Perempuan	JUMLAH	PROPORSI
1	PNS	1.590	3.304	4.894	60.316
2	PPPK	1.265	1.955	3.220	39.684
	Jumlah	2.855	5.259	8.114	100.00

Sumber Data : BKPSDM Daerah Kab. Sikka, 2026

- 8) Jumlah PNS menurut usia, dapat dilihat pada tabel 1.15 berikut ini:

Tabel 1.15
Jumlah PNS menurut usia

NO	Usia	JUMLAH	PROPORSI (%)
1	21-25 Tahun	60	1.226
2	26-30 Tahun	305	6.232
3	31-35 Tahun	457	9.338
4	36-40 Tahun	573	11.708
5	41-45 Tahun	784	16.020
6	46-50 Tahun	892	18.226
7	51-55 Tahun	844	17.246
8	56-60 Tahun	979	20.004
	Jumlah	4.894	100.00

Sumber Data : BKPSDM Daerah Kab. Sikka, 2026

1.6 SUMBER DAYA KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, maka kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pengelolaan Belanja Daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPPMD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel 1.16 dibawah ini:

Tabel 1.16
Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN
1	2
Pendapatan Daerah	1,330,875,000,000
Pendapatan Asli Daerah	124,083,709,163
Pajak Daerah	38,156,896,345
Retribusi Daerah	71,782,725,307
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,635,916,846
Lain-lain PAD yang sah	11,508,170,665
Pendapatan Transfer	1,186,282,500,337
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,145,615,549,000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	40,666,951,337
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	20,508,790,500
Pendapatan Hibah	20,508,790,500
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1,330,875,000,000
Jumlah Pendapatan	1,037,919,587,429.29
Belanja	
Belanja Daerah	
Belanja Operasi	1,037,919,587,429.29
Belanja Pegawai	642,009,633,384.25
Belanja Barang dan Jasa	347,443,478,905.04
Belanja Bunga	9,254,225,286
Belanja Hibah	36,517,749,854
Belanja Bantuan Sosial	2,694,500,000
Belanja Modal	79,470,274,858.17
Belanja Modal Tanah	174,261,508
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38,982,583,054
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,209,651,108.17
Belanja Modal Jalan, Jalinan dan Irigasi	9,386,810,688
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,716,968,500
Belanja Tidak Terduga	1,135,421,364.20
Belanja Tidak Terduga	1,135,421,364.20
Belanja Transfer	226,698,887,330
Belanja Bagi Hasil	4,802,900,000
Belanja Bantuan Keuangan	221,895,987,330
Jumlah Belanja	1,345,224,170,981.66
Total Surplus/Defisit	-14,349,170,981.66

URAIAN	ANGGARAN
1	2
Pembiayaan	
Penerimaan Pembiayaan	43,749,590,645.66
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43,749,590,645.66
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	43,749,590,645.66
Pengeluaran Pembiayaan	29,400,419,664
Penyertaan Modal Daerah	0
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	29,400,419,664
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	29,400,419,664
Pembiayaan Netto	14,349,170,981.66
Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenan	0.00

1.7 ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi baik di tingkat internal maupun eksternal, maka Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Sikka berawal dari isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Rendahnya Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia disebabkan oleh masih rendahnya mutu dan layanan akses serta kualitas manajemen pendidikan, rendahnya status kesehatan masyarakat, masih tingginya angka kematian ibu, masih tingginya angka stunting, masih tingginya angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi, belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan, masih tingginya kerawanan pangan masyarakat, rendahnya prestasi di bidang olahraga, rendahnya kualitas dan kuantitas pemuda pelopor pembangunan, belum semua dokumen perencanaan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian ilmiah, belum optimalnya pemanfaatan hasil

kelitbangan untuk peningkatan inovasi dan pembangunan daerah dan belum terwujudnya inovasi daerah yang memadai.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat disebabkan oleh masih rendahnya pengeluaran per kapita masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, rendahnya pertumbuhan PDRB dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata dan perindustrian, terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan rendahnya nilai investasi, masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), belum terpenuhinya indikator yang mendukung pencapaian IDM menuju status kemajuan dan kemandirian desa ke level berikutnya.

3. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan disebabkan oleh rendahnya layanan infrastruktur dasar, ekonomi dan sosial, kualitas lingkungan hidup dan masih tingginya risiko bencana.

4. Reformasi Birokrasi

Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi disebabkan oleh masih rendahnya kinerja akuntabilitas pemerintah dan pelayanan publik yang dapat dicermati dari kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, belum optimalnya pencapaian target dalam perencanaan pembangunan daerah, belum seluruh aspirasi masyarakat terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran, belum optimalnya kinerja Penganggaran, penatausahaan keuangan dan pelaporan Perangkat Daerah, belum optimalnya penerapan SPIP, rendahnya kompetensi ASN, belum optimalnya dukungan terhadap fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, belum optimalnya sosialisasi 4 (empat) konsensus kebangsaan kepada aparaturnya dan masyarakat, belum optimalnya pelaksanaan kewenangan di kecamatan, dan belum optimalnya pelayanan dan fasilitas publik yang ramah difabel.

1.8 SISTIMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Sistimatika penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memuat Latar Belakang, maksud dan tujuan, Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Sikka, Perangkat Daerah, Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Keuangan, Isu Strategis yang sedang dihadapi dan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini dibagi per sub bab yang berisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, Keselarasan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dengan Indikator Kinerja Utama pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini dibagi per sub bab yang berisi capaian kinerja dan analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2025

Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan langkah perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENENGAH DAERAH TAHUN 2024-2026

- a) Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Mengacu pada telaahan dokumen RPJMN tahun 2020–2024, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2005–2025 dan RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 maka tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026, sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
 - b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 - c. Menurunnya Angka Pengangguran
 - d. Meningkatnya Kesenjangan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga
 - e. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
 - f. Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah
 - g. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olahraga
2. Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
 - b. Menurunnya Angka kemiskinan
 - c. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
3. Tujuan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan, dengan sasaran :
 - a. Terwujudnya pemerataan insfrastruktur ekonomi maupun sosial
 - b. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup
 - c. Terwujudnya pengurangan risiko bencana
4. Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan
 - b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset

- c. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Publik
- d. Meningkatnya Pelayanan Publik

b) Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Tabel 2.1 :
Strategi

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	STRATEGI	PERANGKAT DAERAH
1. Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM	1. Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	1. Membangun kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Pendidikan serta pengembangan metode Pendidikan sesuai konteks lokal Dinas PKO, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 2. Mengefektifkan pemanfaatan anggaran untuk peningkatan sarpras dan kualitas guru 3. Penguatan partisipasi Pendidikan melalui dukungan jaringan informasi 4. Memberikan beasiswa Pendidikan Dasar kepada anak dari keluarga kurang mampu 5. Promosi untuk mencegah pernikahan dini 6. Meningkatkan literasi anak melalui Pendidikan non-formal 7. Memperkuat sekolah-sekolah kaki	Dinas PKO, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Membangun kerja sama antara pemerintah, masyarakat, Lembaga Kesehatan swasta, NGO untuk meningkatkan kualitas Kesehatan Dinas Kesehatan 2. Penguatan partisipasi dan jaringan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap PHBS dan penyakit-penyakit degenerative	Dinas Kesehatan
	3. Menurunnya Angka Pengangguran	1. Peningkatan kesempatan kerja dengan memanfaatkan informasi pasar kerja melalui aplikasi sistem informasi tenaga kerja Dinas Nakertrans 2. Memanfaatkan informasi pasar kerja untuk mengurangi angka pengangguran melalui program transmigrasi	Dinas Nakertrans

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	STRATEGI	PERANGKAT DAERAH
	4. Meningkatkan Kesenjangan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga	1. Sinergitas antara pemerintah dan kelompok/lembaga peduli perempuan dan anak dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pendampingan dan rehabilitasi korban kekerasan 2. Memanfaatkan dukungan program dan anggaran pemerintah pusat untuk penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana dan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas penyuluh lapangan KB dan KIE serta sistem informasi siap nikah siap hami (elsimil)	Dinas P2KBP3A
	5. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Peningkatan koordinasi antar daerah untuk ketahanan pangan dan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder melalui sosialisasi dan promosi untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal yang memenuhi prinsip B2SA (beragam bergizi seimbang dan aman) 2. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan penerapan inovasi, kompetensi teknis dan teknologi dalam mendukung produktivitas masyarakat dan ketahanan pangan 3. Penerapan SOP daerah rawan pangan untuk mengefektifkan distribusi cadangan pangan 4. Penyediaan sarana dan prasarana untuk memperkuat ketersediaan pangan lokal serta pemanfaatan pekarangan untuk ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga 5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi konsumsi pangan lokal, optimalisasi pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan bagi masyarakat dan pelaku usaha	Dinas Pangan Ketahanan

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	STRATEGI	PERANGKAT DAERAH
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatkan daya tarik investasi dan PAD dengan memanfaatkan letak Kabupaten Sikka yang strategis dan didukung dengan potensi sektor perikanan, pertanian, peternakan, pariwisata dan perindustrian 2. Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengelolaan PAD melalui pemanfaatan teknologi informasi 3. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor perikanan, pertanian, peternakan, potensi destinasi pariwisata dan perindustrian sesuai permintaan pasar dengan memanfaatkan ketersediaan infrastruktur darat, laut dan udara 4. Meningkatkan pertumbuhan PDRB, PAD dan daya beli masyarakat dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor perikanan, pertanian, peternakan, potensi destinasi pariwisata dan perindustrian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 5. Mengoptimalkan kerja tim pengendali inflasi untuk mengendalikan inflasi daerah 6. Menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna di bidang perikanan, pertanian, peternakan, pariwisata dan perindustrian untuk pemulihan situasi pandemi covid-19 dan untuk menghadapi krisis ekonomi global	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, BAPENDA, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
	2. Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan jaminan sosial 2. Memberdayakan usaha ekonomi produktif keluarga 3. Mengurangi kantong-kantong kemiskinan berbasis kawasan	Dinas Sosial
	3. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	1. Memanfaatkan anggaran, bantuan sosial, SPM, kerjasama antar perangkat pelayanan sosial dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengoptimalkan perlindungan	

	Sosial (PPKS)	dan jaminan sosial		PERANGKAT DAERAH
TUJUAN RPD	SASARAN RPD		STRATEGI	Dinas Sosial
			2. Mengoptimalkan Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan fungsi tagana untuk meningkatkan keterampilan PPKS dan kesadaran masyarakat 3. Memanfaatkan SIKSNG untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan jaminan sosial bagi PPKS 4. Menyediakan SDM Pelayan PPKS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna memberikan informasi dan data yang berkualitas 5. Meningkatkan keterampilan PPKS dengan pelatihan	
	4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat		1. Memanfaatkan regulasi untuk pembinaan dan pengawasan serta memperkuat kualitas Lembaga kemasyarakatan desa melalui Dana Desa 2. Memperkuat regulasi dan organisasi untuk mengintegrasikan proses perencanaan pembangunan desa dan kabupaten serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, pendayagunaan dan pengembangan Kawasan perdesaan 3. Mengoptimalkan peran pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa untuk mengefektifkan fungsi BUMDes dan penciptaan serta penerapan inovasi 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam integrasi perencanaan desa, pengelola pendayagunaan dan pengembangan Kawasan perdesaan 5. Mengoptimalkan organisasi pemerintahan desa, pemerintahan desa dan Lembaga kemasyarakatan desa serta efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa untuk sinergisitas perencanaan desa yang berbasis potensi dan tipologi desa	DINAS PMD

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	STRATEGI	PERANGKAT DAERAH
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	1. Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi maupun sosial	1. Mengoptimalkan dan mengefektifkan perencanaan dengan memanfaatkan DAK, CSR dan program-program dari Lembaga Internasional untuk pengembangan wilayah, pembangunan RLH dan perbaikan RT/LH 2. Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas data dan informasi melalui kerjasama dengan stakeholder dalam pengembangan wilayah 3. Revitalisasi infrastruktur pelayanan dasar di Wilayah Kecamatan untuk menunjang Pariwisata, Pertanian dan Perikanan melalui pendekatan kebijakan lokal dan keswadayaan masyarakat 4. Memantapkan komitmen daerah melalui penyediaan dokumen teknis untuk mendapatkan alokasi pendanaan APBN, Lembaga Swasta dan Internasional dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Dasar, mengendalikan alih fungsi lahan, permukiman kumuh serta meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur guna mengembangkan potensi pariwisata, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 5. Mengoptimalkan kelembagaan . POKJA PKP untuk mendapatkan alokasi DAK, mengendalikan alih fungsi lahan, permukiman kumuh dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur 6. Mengurangi alih fungsi lahan dengan mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai Perda Tata Ruang dan arahan RDTR 7. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi serta sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi untuk peningkatan profesionalisme penyedia jasa konstruksi dalam pengembangan	Dinas PUPR, Dinas PKPP, Dinas Perhubungan

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	perumahan dan permukiman	STRATEGI	PERANGKAT DAERAH
			8. Memanfaatkan bendungan Napun Gete untuk mengoptimalkan potensi pariwisata, pertanian dan perikanan 9. Mengembangkan aksesibilitas dan sarana prasarana Perhubungan 10. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah untuk mengefektifkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar guna mengembangkan potensi pariwisata, pertanian dan perikanan	
	2. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup		1. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan. Mengoptimalkan fungsi Laboratorium Lingkungan Hidup, JAKSTRADA pengelolaan persampahan, fasilitas penanganan bencana, pelatihan desa tangguh bencana melalui peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait dan pemberdayaan masyarakat dengan dukungan dari APBN dan CSR serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan lingkungan 2. Penegakan Perda Pengelolaan Persampahan dan penerapan TPS3R guna mendukung pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder 3. Mengefektifkan pelaksanaan penanganan bencana dalam rangka tanggap darurat bencana sesuai SOP bagi penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana 4. Mengefektifkan pemanfaatan dana tanggap darurat untuk penanganan bencana 5. Memanfaatkan peta mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, tim reaksi cepat penanganan	BPBD, Dinas Lingkungan Hidup

		bencana dan sistem peringatan dini serta forum PRB untuk mengurangi resiko bagi	
TUJUAN RPD	SASARAN RPD	STRATEGI	PERANGKAT DAERAH
		penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana dalam mendukung Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 6. Menyiapkan Perda PB/PRB untuk mendukung Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 7. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup melalui sosialisasi UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Pengelolaan Sampah 8. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup untuk mengurangi eksplotasi sumber daya alam secara ilegal dan degradasi lingkungan serta menghadapi anomali iklim	
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan konsistensi antar dokumen perencanaan melalui pemanfaatan SIPD RI, 2. Mengoptimalkan kapabilitas dan peran APIP serta maturitas SPIP untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 3. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, penyediaan tenaga fungsional, peningkatan kompetensi aparatur dan penempatan SDM Aparatur sesuai regulasi tentang kepegawaian 4. Menyediakan Perda dan Perbup serta Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur untuk mengantisipasi perubahan kebijakan tentang kepegawaian, organisasi dan perencanaan 5. Memperkuat Maturitas SPIP sebagai dasar pemberian Reward dan Punishment untuk pengembangan SDM Aparatur 6. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui kemitraan dengan LSM/NGO 7. Meningkatkan ketepatan fungsi perangkat daerah yang didukung dengan regulasi tentang perangkat daerah	BKDP/SDM, BAPELITBANG, INSPEKTORAT

	2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Mengoptimalkan kinerja aparatur dalam pelayanan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas kinerja dan anggaran pengelolaan keuangan daerah, serta pengungkapan dalam penyusunan laporan keuangan dengan memanfaatkan aplikasi SIPD RI dan aplikasi pengelolaan BMD serta meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan laporan keuangan untuk mempertahankan Opini BPK dan peluang mendapatkan dana transfer daerah guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaporan keuangan dan aset daerah 2. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan stakeholder serta memanfaatkan website perencanaan dan penganggaran guna mengoptimalkan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan BMD Perangkat Daerah 3. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui penegakkan regulasi daerah, peningkatan kualitas SDM Aparatur, optimalisasi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah, peningkatan kinerja penatausahaan BMD Perangkat Daerah serta akuntabilitas kinerja dan anggaran pengelolaan keuangan daerah yang mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah guna menjaga stabilitas keuangan daerah 4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur untuk tercapainya laporan keuangan yang taat azas 5. Mengurangi intervensi terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan daerah untuk mengoptimalkan kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	BPKAD
--	--	---	-------

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	STRATEGI	PERANGKAT DAERAH
	3. Meningkatkan Efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan	1. Meningkatkan peran Forum Satu Data melalui optimalisasi penggunaan aplikasi, data dan informasi berbasis web 2. Menjaga kondusifitas keamanan daerah melalui penegakan regulasi daerah, peningkatan jumlah PPNS, peningkatan kesadaran masyarakat serta peningkatan sistem pengamanan data 3. Memperkuat kapasitas website untuk meningkatkan tertib administrasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan 4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mengurangi daerah blank spot 5. Memperkuat regulasi untuk peningkatan sistem pengamanan data dan Kapasitas Website Pemda 6. Memperkuat kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi Mitra Pemerintah, Forum-Forum Koordinasi Daerah, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Kesbangpol, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
	4. Meningkatkan Pelayanan Publik	1. Memanfaatkan TIK untuk memperkuat sistem informasi pelayanan publik, meningkatkan efektivitas konsultasi dan pengaduan, meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dan menciptakan inovasi pelayanan publik 2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana, kapasitas SDM Aparatur dan penguatan regulasi serta SOP untuk meningkatkan pelayanan publik dan 3. Mengoptimalkan pelaksanaan konsultasi dan pengaduan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan berdasarkan regulasi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Satuan Pol. pp DAMKAR, Bapelitbang, Kecamatan, Kelurahan

2. Arah Kebijakan

Tabel 2.2 :
Arah Kebijakan

SASARAN RPD		ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025
1. Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat		Meningkatkan kualitas Pendidikan melalui peningkatan sarpras dan kualitas guru, penguatan jaringan informasi, pemberian beasiswa pendidikan dasar, pencegahan pernikahan dini, peningkatan literasi pendidikan non formal dan penguatan sekolah-sekolah kaki
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Peningkatan kualitas Kesehatan melalui efektivitas pemanfaatan anggaran untuk sarpras, penambahan dan pemerataan penyebaran tenaga Kesehatan, kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta serta optimalisasi inovasi sahabat sehat dan penciptaan inovasi baru.
3. Menurunkan Angka Pengangguran	Angka	Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri untuk mengurangi pengangguran
4. Meningkatkan Kesetaraan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga		Meningkatkan partisipasi perempuan dalam Politik, Jabatan Publik dan Ekonomi serta mengurangi kerentanan ekonomi perempuan, mengurangi angka kelahiran serta penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana dan perlindungan perempuan dan anak
5. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat		Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan lokal yang memenuhi prinsip B2SA, mendukung produktivitas masyarakat dan ketahanan pangan, mengefektifkan distribusi pangan, pemanfaatan teknologi informasi pangan, optimalisasi pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan
6. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektoral, PAD, daya beli masyarakat, investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan serta pemulihan situasi pasca pandemi covid-19
7. Menurunkan Angka Kemiskinan	Angka	Memberikan jaminan sosial, memberdayakan usaha ekonomi produktif keluarga serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan berbasis Kawasan

SASARAN RPD		ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025
8. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan kualitas data untuk mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	
9. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Memanfaatkan regulasi, mengoptimalkan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa serta efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa untuk sinergisitas, integrasi perencanaan desa yang berbasis potensi, tipologi desa serta optimalisasi fungsi BUMDes dan Inovasi Desa	
10. Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial	Mengoptimalkan dan mengefektifkan perencanaan pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian pemanfaatan ruang, meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan RLH dan perbaikan RTLH yang mendukung pengembangan potensi pariwisata, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	
11. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Menyiapkan regulasi, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat, meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, degradasi lingkungan dan anomali iklim serta meningkatkan manajemen resiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan bencana.	
12. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, penyediaan tenaga fungsional, peningkatan kompetensi aparatur dan penempatan SDM aparatur sesuai regulasi tentang kepegawain, meningkatkan kualitas perencanaan melalui pemanfaatan SIPD RI, mengoptimalkan kapabilitas dan peran APIP serta maturitas SPIP, menyediakan Perda dan Perbup guna meningkatkan ketepatan fungsi perangkat daerah dan optimalisasi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan	
13. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui penegakkan regulasi daerah, optimalisasi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah, peningkatan kinerja penatausahaan BMD Perangkat Daerah serta akuntabilitas kinerja dan anggaran pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan aplikasi SIPD RI guna menjaga	

SASARAN RPD	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025
	stabilitas keuangan daerah, mempertahankan Opini BPK dan peluang mendapatkan dana transfer daerah melalui koordinasi dan kemitraan serta memanfaatkan website perencanaan dan penganggaran
14. Meningkatnya Efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan peran Forum Satu Data, menjaga kondusifitas keamanan daerah, penguatan kapasitas website, penguatan regulasi dan kerjasama pemerintah dengan stakeholder (perguruan tinggi Mitra Pemerintah, Forum-Forum Koordinasi Daerah, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik)
15. Meningkatnya Pelayanan Publik	Memanfaatkan TIK, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana, kapasitas SDM Aparatur dan penguatan regulasi serta SOP, Mengoptimalkan pelaksanaan konsultasi dan pengaduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public
16. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektoral, PAD, daya beli masyarakat, investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan serta pemulihan situasi pasca pandemi covid-19

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR 681 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan bupati ini.
- KEDUA** : (1) Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Indikator Kinerja Utama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Kabupaten merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk :
- a. menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
 - b. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - c. menetapkan Perjanjian Kinerja (PK);
 - d. menyusun pohon kinerja;
 - e. menyusun cascading;
 - f. menyusun Rencana Aksi;
 - g. melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan
 - i. melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KEEMPAT** : (1) Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

Diktum KETIGA dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

- (2) Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka berkewajiban melakukan:

- a. monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten dan Perangkat Daerah; dan
- b. monitoring dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten dan Perangkat Daerah untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka bertanggungjawab kepada Bupati.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024. *f*

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 31 Desember 2024

f Pj. BUPATI SIKKA *f*

Adrianus Firminus Parera
(ADRIANUS FIRMINUS PARERA) *f*

BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. SIKKA		
JABATAN	TANGGAL	PARAF
PENGETIK		<i>f</i>
KABAG ORGANISASI		<i>f</i>
KABAG HUKUM		<i>f</i>
ASISTEN		<i>f</i>
SEKDA		<i>f</i>

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR ~~661~~ TAHUN 2024
TANGGAL 31 ~~DESEMBER~~ 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024 - 2026

- I. Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Sikka
- II. Tugas : menjalankan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sikka mencakup urusan wajib dan urusan pilihan *sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan*
- III. Fungsi : mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah
- IV. Indikator Kinerja Utama : Pemerintah Kabupaten Sikka

O	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
I.	Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	IPM untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indikator pembentuk IPM yaitu Indeks Kesehatan (melalui Angka Harapan Hidup), Indeks Pendidikan (melalui Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama Sekolah dan Indeks Pengeluaran (melalui pengeluaran Rumah tangga / jumlah anggota Rumah tangga), dirumuskan: $\sqrt{\frac{\text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Pengeluaran} \times 100}{3}}$ Kategori penilaian: ❖ Rendah, IPM < 60 ❖ Sedang, 60 ≤ IPM < 70 ❖ Tinggi, 70 ≤ IPM < 80 ❖ Sangat tinggi, ≥ 80	Indeks		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
I.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dirumuskan : $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	Tahun		Badan Statistik & Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Olahraga

1	2	3	4	5	6	7
			Dimana: RLS : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas Ri : Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 15 tahun N : Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas			
		HLS (Harapan Lama Sekolah)	Harapan lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dirumuskan : $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Dimana: HLS_a^t : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t FK : Faktor koreksi i : Usia (a, a+1, ..., n) E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t	Tahun		Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga
					Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga

1	2	3	4	5	6	7
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	IPLM merupakan penilaian terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. IPLM ditetapkan berdasarkan 7 komposit, yaitu : 1. Rasio Pemerataan Layanan Perpustakaan 2. Rasio Ketercukupan Koleksi 3. Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan 4. Rasio Tingkat Kunjungan Pemustaka Per Hari 5. Rasio Perpustakaan Ber NSP 6. Rasio Partisipasi Masyarakat Dalam Promosi Perpustakaan 7. Rasio Anggota Perpustakaan Dirumuskan : $\text{IPLM} = \frac{\text{Jumlah komposit IPLM}}{7}$	Indeks	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	UHH (Usia Harapan Hidup)	Tinggi rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan tinggi rendahnya taraf hidup suatu daerah, semakin tinggi UHH di suatu daerah	Tahun		Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7
			maka kondisi kesehatan di daerah tersebut akan semakin baik. Usia Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu			
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
					Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.3	Menurutnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yang menganggur terhadap total jumlah angkatan kerja dikalikan 100. Dirumuskan : $\frac{\text{jumlah angkatan kerja yang menganggur}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100$	%		

1	2	3	4	5	6	7
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.4	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	IPG adalah ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan kelimpangan gender (kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan), dirumuskan : $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$	Indeks		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		IDG (Indeks Development Gender)	IDG digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan, yang dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknis, keprofesional dan ketatalaksanaan dan sumbangan pendapatan.	Indeks		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3	4	5	6	7
			Dirumuskan : $IDG = 1/3 (Ipar + IDM + Linc-Dist)$ Dimana : Ipar : Indeks Keterwakilan di Parlemen IDM : Indeks Pengambilan Keputusan Linc-dist Indeks Distribusi Pendapatan			
		TFR (Total Fertility Rate)	TFR adalah indikator yang digunakan dalam demografi untuk mengukur: 1. jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita dalam kelompok usia reproduktif antara 15-49 tahun. 2. Efektivitas kebijakan KB dan upaya pengendalian pertumbuhan populasi dan potensi perubahan dalam struktur demografi wilayah. TFR dirumuskan : $TFR = 5 \times \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ Dimana: ASFR_i : angka kelahiran untuk perempuan pada kelompok umur i i=1 : kelompok umur 20 - 24 i=7 : kelompok umur 45 - 49	Angka		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pengarusutamaan Gender & pemberdayaan	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,

1	2	3	4	5	6	7
					Perempuan	pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHIA)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3	4	5	6	7
					Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pembinaan KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
1.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi serta stok beras	Rasio konsumsi normatif produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten, dirumuskan : $\frac{(C_{norm})}{F \text{ (gram)}} = Z$	Nilai Rasio		Dinas Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5	6	7
		pemerintah daerah kabupaten	Dimana : C_{norm} : Konsumsi normalife (300gr/kap/hari) F : Ketersediaan pangan per kapita/hari Z : Nilai Ratio Pengkelasan terhadap nilai ratio: ≥ 1.50 : defisit tinggi $1.25 - 1.50$: defisit sedang $1.00 - 1.25$: defisit rendah $0.75 - 1.00$: surplus rendah $0.50 - 0.75$: surplus sedang < 0.50 : surplus tinggi			
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
1.6	Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Persentase penelitian yang lanjut kebijakan pembangunan daerah	Perbandingan jumlah hasil penelitian yang digunakan untuk pengambilan kebijakan terhadap jumlah keseluruhan penelitian tahun N dikalikan 100.	%		

1	2	3	4	5	6	7										
			Dapat dirumuskan : Perbandingan jumlah hasil penelitian yang digunakan untuk pengambilan kebijakan $\times 100$ jumlah keseluruhan penelitian tahun N													
	Indeks Daerah	Inovasi	Indeks Inovasi Daerah adalah alat ukur perkembangan inovasi di pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah berkontribusi untuk menginput Inovasi ke dalam aplikasi Innovative Government Award (IGA) untuk penilaiannya. Rumusan penilaiannya : Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kategori penilaian : <table><tr><td>Kategori</td><td>Rentang Skor</td></tr><tr><td>Sangat Inovatif</td><td>60.01 - 100.00</td></tr><tr><td>Inovatif</td><td>35.00 - 60.00</td></tr><tr><td>Kurang Inovatif</td><td>0.01 - 34.99</td></tr><tr><td>Tidak dapat dinilai</td><td>0</td></tr></table>	Kategori	Rentang Skor	Sangat Inovatif	60.01 - 100.00	Inovatif	35.00 - 60.00	Kurang Inovatif	0.01 - 34.99	Tidak dapat dinilai	0	Indeks		Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah
Kategori	Rentang Skor															
Sangat Inovatif	60.01 - 100.00															
Inovatif	35.00 - 60.00															
Kurang Inovatif	0.01 - 34.99															
Tidak dapat dinilai	0															
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan 6 (enam) dimensi terkait kinerja perencanaan dan kinerja anggaran dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata	Indeks		Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah										

1	2	3	4	5	6	7
			kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. 6 (enam) dimensi yaitu Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Kualitas Anggaran Belanja dalam APBD, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyerapan Anggaran, Kondisi Keuangan Daerah, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dirumuskan : Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri atas Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			
1.7	Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga	Persentase pemuda pelopor	Pemuda pelopor adalah pemuda-pemuda yang kreatif untuk mewujudkan gagasan menjadi sebuah karya atau kerja nyata. Dalam hal ini Mengukur peningkatan prestasi olahraga, dapat dirumuskan: Jumlah komposit (Cabang Olahraga Berprestasi + Jumlah Perolehan Penghargaan Prestasi di bidang	%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga

1	2	3	4	5	6
			Olahraga + Jumlah Pemuda Pelopor $\frac{\text{Pembangunan}}{\text{Target}} \times 100$		
					Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan
II.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Perbandingan jumlah pengeluaran (makanan dan non makanan) perbulan terhadap jumlah anggota rumah tangga. Dirumuskan : $\frac{\text{Jumlah pengeluaran perbulan}}{\text{jumlah anggota rumah tangga}} \times 100$	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
II.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi (barang dan jasa) pada suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk	%	Badan Perencanaan Pembangunan.

1	2	3	4	5	6	7
			kenaikan pendapatan nasional. Dirumuskan : $\frac{\text{Nilai produksi barang dan jasa tahun ke } n}{\text{Nilai produksi barang dan jasa tahun ke } n-1} \times 100$			Riset dan Inovasi Daerah
		Jumlah Investasi	Nilai investasi merupakan penjumlahan investasi awal dan investasi akhir dibagi dua. Perhitungan biasanya <i>rate of return</i> diperoleh dengan cara membagi laba sesudah pajak dengan investasi. Nilai Investasi di Kabupaten Sikka bersumber dari Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pelaku Usaha PMDN dan PMA yang sudah diverifikasi setiap periode pelaporan dan dirilis melalui website NSW/BKPM Nilai investasi terdiri dari Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) dan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dikalikan 100. $\text{Dirumuskan : } \frac{\left[\begin{array}{l} \text{Jumlah} \\ \text{Penjualan} \end{array} - \begin{array}{l} \text{Biaya} \\ \text{Investasi} \end{array} \right]}{\text{Biaya Investasi}} \times 100$	Rupiah		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1	2	3	4	5	6	7
		Derajat Desentralisasi Fiskal	Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Dirumuskan : $\frac{\text{Jumlah dana dekon yang diterima oleh Perangkat Daerah tertentu}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100$	%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Program pengembangan iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Program pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Badan Pendapatan Daerah

1	2	3	4	5	6	7
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Pengendalian Kesehatan	Dinas Pertanian
					Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
					Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Dinas Pertanian
					Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian

1	2	3	4	5	6	7
					Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan & perlindungan hak kekayaan intelektual	Dinas Pariwisata
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
					Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata

1	2	3	4	5	6	7
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
II.2	Menurutnya Angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Perbandingan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu terhadap jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen, dirumuskan : $\frac{\text{Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama}} \times 100$	%		
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, & Usaha Mikro	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1	2	3	4	5	6	7
					Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
II.3	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantosa untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial adalah seseorang, kelompok maupun masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan wajar. Dapat dirumuskan : $\frac{\text{Jumlah PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100$	%		
					Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
					Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
					Program Penanganan Warga Negara Migran Korban tindak Kekerasan	Dinas Sosial
					Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial

1	2	3	4	5	6	7
II.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	IDM (Indeks Desa Membangun)	IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan ekologi/ lingkungan (IKL) IDM digunakan untuk memotret perkembangan kemandirian desa dengan mengarahkan ketepatan intervensi dan koreksi kebijakan dengan karakteristik wilayah desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016. Dapat dirumuskan: $IDM = \frac{\text{Nilai IKS} + \text{IKE} + \text{IKL}}{3}$	Indeks		
					Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

1	2	3	4	5	6	7
III	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah	Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dapat dirumuskan : $\frac{\text{Jumlah rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin}}{\text{penduduk miskin}} \times 100$ Garis Kemiskinan	%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
III.1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	IKID merupakan ukuran untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Kualitas infrastruktur yang baik dapat mempengaruhi standar kehidupan masyarakat dan kesehatan. IKID dapat dirumuskan : $\% \text{ Jaringun Irigasi dalam Kondisi Baik} + \% \text{ rumah tangga dengan akses air minum layak} + \% \text{ rumah tangga dengan akses air limbah atau sanitasi layak} + \% \text{ drainase skala kota dalam kondisi baik} + \% \text{ panjang jalan kabupaten dalam keadaan baik}$	Indeks		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5

1	2	3	4	5	6	7
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1	2	3	4	5	6	7
					Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
					Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
III.2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Hutan/Lahan (IKTL). Dapat dirumuskan : $IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$	Indeks		
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7
					Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7
					Program Penanganan Pengaduan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
III.3	Terwujudnya pengurangan risiko bencana	Indeks Bencana	Nilai yang dikeluarkan oleh BPHD Provinsi NTT	Indeks		
					Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/kategori hasil evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PANRB	Indeks		Sekretariat Daerah
IV.1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	SAKIP	Nilai hasil evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB	Nilai		
					Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Daerah
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

1	2	3	4	5	6	7
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
					Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	Inspektorat Daerah
IV.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Opini yang diberikan oleh BPK terhadap Hasil Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini		
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
IV.3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Publik	Indeks kebijakan Publik	Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik dilakukan dengan memperhatikan proses perencanaan kebijakan dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan dan aspek :	Indeks		

1	2	3	4	5	6	8
			a. Perencanaan Kebijakan b. Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan			
					Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Peningkatan Lembaga Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik & pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3	4	5	6	7
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Pemerintahan dan Kesra	Sekretariat Daerah
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD

1	2	3	4	5	6	7
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Kearsipan dan perpustakaan
IV.4	Meningkatnya Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Penilaian terhadap hasil survey pelayanan publik	Indeks		
					Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penadam Kebakaran

1	2	3	4	5	6	7
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21 Kecamatan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21 Kecamatan
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17 Kecamatan
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Kecamatan
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	BLUD TC. Hillers

V. TARGET TAHUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA : PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024 - 2026

NO	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUA N	KONDISI AWAL (2022)	TAHUN			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Indeks	66.06	66.50	67.00	67.5	67.5
		RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	8.67	8.82	8.97	9.12	9.12
		HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15.3	15.41	15.51	15.62	15.62
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	11.00	12.00	13.00	14.00	14.00
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	67.86	67.97	68.02	68.20	68.20
1.3	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.51	4.48	4.45	4.42	4.42
1.4	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	88.93	89.05	89.20	89.25	89.25
		IDG (Indeks Development Gender)	Indeks	62.53	62.55	62.57	62.60	62.60
		TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2.60	2.59	2.58	2.57	2.57
1.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio konsumsi normatif ter hadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	Nilai Rasio	0.58	0.56	0.53	0.49	0.49
1.6	Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	%	50	70	75	80	80
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	43.28	60.01	65.00	70.00	70.00
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	56.1	65.00	70.00	80.00	80.00

✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.7	Meningkatnya kualitas kepedulian dan prestasi di bidang olahraga	Persentase pemuda pelopor	%	60.00	65.00	70.00	75.00	75.00
II.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	839,377.00	923,314.70	1,015,646.17	1,117,210.79	1,117,210.79
II.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	3.37	3.8	4.04	4.30	4.30
		Jumlah Nilai Investasi	Milyard Rupiah	215	220	222	225	225
II.2	Menurunnya Angka kemiskinan	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	8.64	10.19	10.89	11.59	11.59
II.3	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penduduk Miskin	%	12.61	12.19	11.69	11.19	11.19
II.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	53.77	55.85	57.95	60.15	60.15
III	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	IDM (Indeks Desa Membangun)	Indeks	0.62	0.64	0.65	0.66	0.66
III.1	Terwujudnya Pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial	Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah	%	14.72	14.00	13.00	12.00	12.00
III.2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	Indeks	55.85	56.28	57.61	59.01	59.01
III.3	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	68.98	70.11	71.70	73.81	73.81
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Resiko Bencana	Indeks	137.78	129.08	123.38	117.68	117.68
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	C	C	CC	CC

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	SAKIP	Nilai	B	B	B	B	B
IV.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IV.3	Meningkatnya Kualitas kebijakan Publik	Indeks Kualitas kebijakan Publik	Indeks	1.83	2.00	2.18	2.28	2.28
IV.4	Meningkatnya Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	2.8	3.00	3.5	3.7	3.7

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI SIKKA

 ADRIANUS FIRMINUS PARERA

**2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIKKA TAHUN 2025**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2025**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Indeks	67.00
1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	8.97
		HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15.51
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	13.00
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	68.02
1.3	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.45
1.4	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender Dan Kualitas Keluarga	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	89.20
		IDG (Indeks Development Gender)	Indeks	62.57
		TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2.58
1.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio Konsumsi Normatif Terhadap Produksi Bersih Beras, Jagung, Ubi Jalar, Dan Ubi Kayu Serta Stok Beras Pemerintah Daerah Kabupaten	Nilai Rasio	0.53
1.6	Meningkatnya Kualitas	Persentase Hasil Penelitian Yang Ditindaklanjuti Untuk	%	75.00

1	2	3	4	5
	Kelitbangan Untuk Mendukung Kebijakan Daerah	Kebijakan Pembangunan Daerah		
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65.00
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	70.00
1.7	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Prestasi di Bidang Olahraga	Persentase Pemuda Pelopor	%	70.00
II	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	1,015,646.17
2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.04
		Jumlah Nilai Investasi	Rupiah	220,000,000,000
		Derajat Desentralisasi Fiskal	%	10.89
2.2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	11.69
2.3	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Yang Memperoleh Bansos Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	57.95
2.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	IDM (Indeks Desa Membangun)	Indeks	0.65
III	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah	Nilai	13.00
3.1	Terwujudnya Pemerataan Insfra-struktur Ekonomi Maupun Sosial	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	Indeks	57.61
3.2	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	70.71
3.3	Terwujudnya Pengurangan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	123.38

1	2	3	4	5
IV	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C
4.1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	SAKIP	Nilai	B
4.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Opini BPK	Opini	WTP
4.3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Indeks	2.18
4.4	Meningkatnya Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	3.50

Jumlah Anggaran sebesar Rp979,762,447,536.89

Maumere, 8 Oktober 2025


JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO, S.H

2.4. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YUVENTUS PRIMA YORIS KAGO, S.H
Jabatan : Bupati Sikka

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Maumere, 8 Oktober 2025


JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO, S.H

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM	IPM	Indeks	67.00
1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	8.97
		HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15.51
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	13.00
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	68.02
1.3	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.45
1.4	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender Dan Kualitas Keluarga	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	89.20
		IDG (Indeks Development Gender)	Indeks	62.57
		TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2.58
1.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio Konsumsi Normatif Terhadap Produksi Bersih Beras, Jagung, Ubi Jalar, Dan Ubi Kayu Serta Stok Beras Pemerintah Daerah Kabupaten	Nilai Rasio	0.53
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target

1	2	3	4	5
1.6	Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Untuk Mendukung Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Penelitian Yang Ditindaklanjuti Untuk Kebijakan Pembangunan Daerah	%	75.00
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65.00
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	70.00
1.7	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan Dan Prestasi Di Bidang Olah Raga	Persentase Pemuda Pelopor	%	70.00
II	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	1,015,646.17
2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.04
		Jumlah Nilai Investasi	Rupiah	220,000,000,000
		Derajat Desentralisasi Fiskal	%	10.89
2.2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	11.69
2.3	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejah-teraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Yang Memperoleh Bansos Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	57.95
2.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	IDM (Indeks Desa Membangun)	Indeks	0.65
III	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah	Nilai	13.00
1	2	3	4	5

	Berbasis Lingkungan			
3.1	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi Maupun Sosial	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	Indeks	57.61
3.2	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	70.71
3.3	Terwujudnya Pengurangan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	123.38
IV	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C
4.1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	SAKIP	Nilai	B
4.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Opini BPK	Opini	WTP
4.3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Indeks	2.18
4.4	Meningkatnya Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	3.50

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Program Pengelolaan Pendidikan	93.963.611.764	APBD
2	Program Pengembangan Kurikulum	56.546.900	APBD
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	34.862.400	APBD
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	17.000.000	APBD
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.545.799.600	APBD
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	10.991.800	APBD
7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	75.000.000	APBD
8	Program Pembinaan Perpustakaan	916.743.600	APBD
9	Program Pengelolaan arsip	235.602.900	APBD
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	71.553.346.360	APBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.061.982.426	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	431.854.900	APBD
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.407.440.600	APBD
1	Program Pengendalian Penduduk	96.000.000	APBD
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.304.503.662	APBD
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.433.119.700	APBD
4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	24.826.200	APBD
5	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	201.811.988	APBD
6	Program Kenaekaragaman Hayati (KEHATI)	603.287.456	APBD
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	18.827.900	APBD
21	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	122.732.400	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
22	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	32.233.800	APBD
23	Program Pengelolaan Persampahan	3.910.336.200	APBD
24	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	194.510.690	APBD
25	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.887.580.944	APBD
26	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.167.460.700	APBD
27	Program Penyuluhan Pertanian	1.025.096.800	APBD
28	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	440.296.350	APBD
29	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	9.045.939.500	APBD
30	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	-	APBD
31	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	727.078.100	APBD
32	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.598.863.830	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
33	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	85.732.400	APBD
34	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	65.133.700	APBD
35	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	93.495.000	APBD
36	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	-	APBD
37	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	15.990.100	APBD
38	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-	APBD
39	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	-	APBD
40	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	319.183.300	APBD
41	Program Pengembangan UMKM	223.633.980	APBD
42	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	749.874.772	APBD
43	Program Pemasaran Pariwisata	63.425.400	APBD
44	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan	925.684.830	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
	Ekonomi Kreatif		
45	Program Pengembangan Kebudayaan	651.838.400	APBD
46	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	APBD
47	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.413.129.800	APBD
48	Program Penempatan Tenaga Kerja	138.436.374	APBD
49	Program Hubungan Industrial	36.755.100	APBD
50	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	APBD
51	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	-	APBD
52	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	31.152.400	APBD
53	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	158.136.700	APBD
54	Program Penanganan Kerawanan Pangan	83.016.200	APBD
55	Program Pengawasan Keamanan Pangan	136.012.258	APBD
56	Program Penyelenggaraan Jalan	4.501.977.033	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
57	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	75.000.000	APBD
58	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.505.915.335	APBD
59	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.598.899.100	APBD
60	Program Penataan Bangunan Gedung	87.087.700	APBD
61	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	113.940.000	APBD
62	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	69.554.800	APBD
63	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	39.220.700	APBD
64	Program Kawasan Permukiman	-	APBD
65	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	4.565.001.900	APBD
66	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	271.177.200	APBD
67	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	316.947.008	APBD
68	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.336.693.900	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
69	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.914.329.846	APBD
70	Program Pengelolaan Pelayaran	96.387.582	APBD
71	Program Penanggulangan Bencana	516.329.400	APBD
72	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	319.234.400	APBD
73	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	804.066.800	APBD
74	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	532.477.450	APBD
75	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	852.996.154	APBD
76	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	75.501.000	APBD
77	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	928.518.900	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
78	Program Rehabilitasi Sosial	419.962.400	APBD
79	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	347.709.800	APBD
80	Program Penanganan Bencana	52.075.100	APBD
81	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	16.077.400	APBD
82	Program Pemberdayaan Sosial	171.992.200	APBD
83	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	13.751.600	APBD
84	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	25.074.900	APBD
85	Program Perlindungan Perempuan	196.585.220	APBD
86	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	20.741.000	APBD
87	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	-	APBD
88	Program Perlindungan Khusus Anak	20.151.300	APBD
89	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.304.402.400	APBD
90	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan	7.053.268.600	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
	Rakyat		
91	Program Penyelenggaraan Pengawasan	508.169.000	APBD
92	Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	209.389.700	APBD
93	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.075.788.100	APBD
94	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	805.911.500	APBD
95	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.713.762.800	APBD
96	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	5.828.882.328	APBD
97	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.993.832.400	APBD
98	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.080.924.388	APBD
99	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	1.970.437.540	APBD
100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		APBD
101	Program Pendaftaran Penduduk	178.176.000	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
102	Program Pencatatan Sipil	164.255.300	APBD
103	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	571.729.854	APBD
104	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	11.982.500	APBD
105	Program Promosi Penanaman Modal	29.583.400	APBD
106	Program Pelayanan Penanaman Modal	51.698.618	APBD
107	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	74.100.000	APBD
108	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	90.090.680	APBD
109	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	122.738.000	APBD
110	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	47.803.600	APBD
111	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	125.905.700	APBD
112	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	79.050.900	APBD
113	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	82.355.000	APBD
114	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	904.587.200	APBD

1	2	3	4	5	6	7
29	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik
30	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)



Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka merupakan wujud kewajiban Bupati selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Sikka dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintah Daerah kepada publik atas kinerja yang telah dicapai. Pedoman penyusunan laporan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, yaitu Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan, dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan. Oleh karena itu hasil penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penyelenggaraan pembangunan dijabarkan dalam 24 urusan wajib (6 urusan wajib pelayanan dasar dan 18 urusan wajib pelayanan non dasar), 6 urusan pilihan dan 9 urusan pemerintahan fungsi penunjang telah dipetakan dalam tujuan dan indikator kinerja yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025. Dalam Laporan kinerja ini akan disajikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi/pelaporan LKjIP Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka dan data eksternal yang berasal dari luar instansi/ lintas sektoral (Data BPS Kabupaten Sikka)

2. Analisa data

Data yang diperoleh dianalisis dan dilakukan penghitungan capaian kinerja indikator kinerja sasaran, dengan rumus:

- 1). Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal dan kriteria keberhasilan yang digunakan dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, maka setiap capaian diberi penilaian sesuai dengan kategori yang dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Kategori Penilaian Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

No	Kategori	Nilai	Angka Interpretasi
1	AA	> 90-100	Sangat Memuaskan (SM)
2	A	> 80 – 90	Memuaskan (M)
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik (SB)
4	B	> 60 – 70	Baik (B)
5	CC	> 50 – 60	Cukup Baik (CB)
6	C	> 30 – 50	Kurang (K)
7	D	0 – 30	Sangat kurang (SK)

Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Sikka Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Bupati Sikka merupakan kinerja tahun pertama dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.

Secara rata-rata capaian seluruh kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah 189.29%, angka interpretasi sangat memuaskan (SM) dan kategori AA, sedangkan rata-rata capaian indikator kinerja Tujuan sebesar 79.99% dan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 206.10%.

3.1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka telah dilakukan penyelarasan terhadap kinerja yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.

Selanjutnya untuk setiap pernyataan indikator kinerja utama dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024
3. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, dan daerah lain.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sikka sesuai Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.2
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING SDM	IPM	Indeks	67.00	73.37	109.51	AA	SM
1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	8.97	9.39	104.68	AA	SM
		HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15.51	16.17	104.26	AA	SM
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	13.00	48.66	374.31	AA	SM
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	68.02	74.24	109.73	AA	SM

1.3	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.45	2.33	147.64	AA	SM
1.4	Meningkatnya kesetaraan, keadilan Gender dan Kualitas Keluarga	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	89.20	66.73	74.81	BB	SB
		IDG (Indeks Development Gender)	Indeks	62.57	89.87	143.63	AA	SM
		TFR (Total Fertility Rate)	angka	2.58	2.19	84.88	A	M
1.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	Nilai Rasio	0.53	1.18	222.64	AA	SM
1.6	Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	%	75.00	100	133.33	AA	SM
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65.00	49.35	75.92	BB	SB
					KURANG INOVATIF			

		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	70.00	63.51	90.73	AA	SM
1.7	Meningkatnya kualitas kepemimpinan dan prestasi di bidang olahraga	Persentase pemuda pelopor	%	70.00	57.40	82.00	A	M
II	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	1,015,646.17	93,632.42	9.219	D	SK
2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.04	4.28	105.94	AA	SM
		Jumlah Nilai Investasi	Juta Rupiah	220	65	29.55	D	SK
		Derajat Desentralisasi Fiskal	%	10.89	10.67	97.98	AA	SM
2.2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	11.69	11.25	96.24	AA	SM
2.3	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	57.95	97.26	167.84	AA	SM
2.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	IDM (Indeks Desa Membangun)	Indeks	0.65	0.67	102.71	AA	SM

III	PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS LINGKUNGAN	Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah	Nilai	13.00	14,33	89,77	A	M
3.1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	Indeks	57.61	56.79	98.58	AA	SM
3.2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	71.70	80.66	112.50	AA	SM
3.3	Terwujudnya pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	123.38	138.41	87.82	AA	SM
IV	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	B	111.48	AA	SM
				50.00	55.74	111.48		
4.1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	SAKIP	Nilai	B	B	101.30	AA	SM
				60.00	60.78	101.30		

4.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100.00	AA	SM
4.3	Meningkatnya kualitas kebijakan publik	Indeks Kualitas kebijakan Publik	Indeks	2.18	52.65	2.415	AA	SM
4.4	Meningkatnya Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	3.50	3.33	95.14	AA	SM
			Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja			189.29%		

2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024

Tabel 3.3
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
					Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
I	MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING SDM	IPM	Indeks	67.00	69.41	69.96
1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	8.97	6.98	9.22

	Masyarakat					
		HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15.51	13.66	16.01
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	13.00	10.858	11.37
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	68.02	68.3	74.24
1.3	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.45	2.62	2.33
1.4	Meningkatnya kesetaraan, keadilan Gender dan Kualitas Keluarga	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	89.20	88.81	89.87
		IDG (Indeks Development Gender)	Indeks	62.57	62.55	65.01
		TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2.58	2.19	2.55

1.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	Nilai Rasio	0.53	0.65	0.79
1.6	Meningkatnya kualitas ketahanan untuk mendukung kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	%	75.00	-	72.73
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65.00	41.99	34.73
					INOVATIF	KURANG INOVATIF
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	70.00	78.019	78.019
1.7	Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olahraga	Persentase pemuda pelopor	%	70.00	89.00	65.00
II	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	1,015,646.17	873.304	937.480

2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.04	3.77	3.95
		Jumlah Nilai Investasi	Juta Rupiah	220,000,000,000	458,096,102,509	48,040,892,683
		Derajat Desentralisasi Fiskal	%	10.89	9.16	8.24
2.2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	11.69	12.56	11.89
2.3	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	57.95	54.00	62.81
2.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	IDM (Indeks Desa Membangun)	Indeks	0.65	0.64	0.65
III	PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS LINGKUNGAN	Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah	Nilai	13.00	-	14.33
3.1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	Indeks	57.61	55.85	55.60

3.2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	71.70	75.44	72.82
3.3	Terwujudnya pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	123.38	135.14	141.81
IV	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	C	CC
4.1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	SAKIP	Nilai	B	B	B
				60.00	-	60.78
4.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
4.3	Meningkatnya kualitas kebijakan publik	Indeks Kualitas kebijakan Publik	Indeks	2.18	2.43	2.43
4.4	Meningkatnya Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	3.50	3.33	3.33

3. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	SATUAN	Target Akhir DPMD 2024 – 2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
I	MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING SDM	IPM	Indeks	67.5	73.37	108.70
1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	9.12	9.39	102.96
		HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15.62	16.17	103.52
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	14.00	48.66	347.57
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	68.20	74.64	108.86

1.3	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.42	2.33	147.29
1.4	Meningkatnya kesetaraan, keadilan Gender dan Kualitas Keluarga	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	89.25	66.73	74.77
		IDG (Indeks Development Gender)	Indeks	62.60	89.87	143.56
		TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2.57	2.19	85.21
1.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	Nilai Rasio	0.49	1.18	240.82
1.6	Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	%	80	100	125.00
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	70.00	49.35	70.50
					KURANG INOVATIF	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	80.00	63.51	79.39
1.7	Meningkatnya kualitas kepemudaan dan	Persentase pemuda pelopor	%	75.00	57.40	76.53

	prestasi di bidang olahraga					
II	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	1,117,210.79	93,632.42	8.38
2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.30	4.28	99.53
		Jumlah Nilai Investasi	Juta Rupiah	225	65	28.89
		Derajat Desentralisasi Fiskal	%	11.59	10.67	92.06
2.2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	11.19	11.25	100.54
2.3	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	60.15	97.26	161.70
2.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	IDM (Indeks Desa Membangun)	Indeks	0.66	0.67	101.15
III	PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS LINGKUNGAN	Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah	Nilai	12.00	14.33	80.58

3.1	Terwujudnya pemerintahan infrastruktur ekonomi maupun sosial	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	Indeks	59.01	56.79	96.24
3.2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	73.81	80.66	109.28
3.3	Terwujudnya pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	117.68	138.41	82.38
IV	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	B	111.48
4.1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	SAKIP	Nilai	BB	B	86.83
				70.00	60.78	86.83
4.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100.00
4.3	Meningkatnya kualitas kebijakan publik	Indeks Kualitas kebijakan Publik	Indeks	2.28	52.65	2.309
4.4	Meningkatnya Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	3.7	3.33	90.00

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional. dan daerah lain, dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.5
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan daerah lain.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi	% Capaian Kinerja Terhadap standar nasional/standar Perangkat Daerah lain				
				Nasional	NTT	Kupang	FLOTIM	ENDE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING SDM	IPM	73.37	75.90	69.14	83.16	69.79	72.24
1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	9.39	9.07	8.22	7.87	8.19	8.52
		HLS (Harapan Lama Sekolah)	16.17	13.21	13.34	16.55	13.17	13.84
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	48.66	72.52	60.53	29.39	43.45	45.35
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	UHH (Usia Harapan Hidup)	74.24	72.39	67.99	69.91	66.21	66.30

1.3	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.33	4.91	3.02	3.36	3.58	2.05
1.4	Meningkatnya kesetaraan, keadilan Gender dan Kualitas Keluarga	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	66.73	91.85	78.26	62.06	55.03	61.01
		IDG (Indeks Development Gender)	89.87	Tidak ada standar nasional	75.10	89.03	92.15	96.33
		TFR (Total Fertility Rate)	2.19	2.1	-	-	-	-
1.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	1.18	Tidak ada standar nasional	-	-	-	-
1.6	Meningkatnya kualitas keliitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	100	Tidak ada standar nasional	-	-	-	-
		Indeks Inovasi Daerah	49.35	65.01	50.10	-	42.33	15.80

			KURANG INOVATIF		INOVATIF		INOVATIF	KURANG INOVATIF
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	63.51	Tidak ada standar nasional	-	-	-	-
1.7	Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olahraga	Persentase pemuda pelopor	57.40	Tidak ada standar nasional	-	-	-	-
II	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pengeluaran Per Kapita	93,632.42	12.340	8.534	-	8.505	10.009
2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4.28	5.02	3.03	-	2.69	3.88
		Jumlah Nilai Investasi	65,000,000,000	Tidak ada standar nasional	-	-	-	-
		Derajat Desentralisasi Fiskal	10.67	Tidak ada standar nasional	-	-	-	-
2.2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	11.25	8.57	19.48	-	11.25	22.57
2.3	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	97.26	Tidak ada standar nasional	-	-	-	-

2.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	IDM (Indeks Desa Membangun)	0.67	Tidak ada standar nasional	-	-	-	-
III	PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS LINGKUNGAN	Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah	14,33	Tidak ada standar nasional	-	-	-	-
3.1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	56.79	Tidak ada standar nasional	-	-	-	-
3.2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	80.66	73.07	-	-	-	-
3.3	Terwujudnya pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	138.41	Tidak ada standar nasional	-	-	122.18	131.19
IV	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Indeks Reformasi Birokrasi	B	-	-	-	-	-
4.1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	SAKIP	B	Tidak ada standar nasional	B	B	B	B
			60.78					

4.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	Tidak ada standar nasional	WTP	-	WTP	WTP
4.3	Meningkatnya kualitas kebijakan publik	Indeks Kualitas kebijakan Publik	52.65	Tidak ada standar nasional	-	-	-	-
4.4	Meningkatnya Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	3.33	Tidak ada standar nasional	-	-	-	-

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, menurut indikator dapat dirincikan sebagai berikut :

(1) IKU IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat
2. Pengetahuan
Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :
 - a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
 - b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
3. Standar Hidup Layak. Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sikka pada tahun 2025 mencapai 73.37 dari target 67.00 dengan capaian kinerja 109.51%. Rincian Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan/ IKU IPM Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Indikator Tujuan/ IKU IPM Tahun 2025

N o	Indikator Tujuan/ IKU	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
I	IPM	Indeks	67.00	73.37	109.51	AA	SM

Apabila realisasi IPM tahun 2025 sebesar 73.37 dibanding dengan realisasi tahun 2023 yaitu 69.41, maka terdapat kenaikan 3.96 poin atau sekitar 5.70% dan dibanding dengan realisasi tahun 2024 yaitu 69.96, maka

terdapat kenaikan 3.41 poin atau sekitar 4,87%. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU IPM dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024 Indikator Tujuan/ IKU IPM

No	Indikator Tujuan/IKU	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	IPM	Indeks	67.00	69.41	69.96

Jika realisasi IPM tahun 2025 sebesar 73.37 dibandingkan dengan target akhir DPMD 2024-2026 sebesar 67.5 maka realisasi IPM 2025 sudah melampaui target akhir DPMD, dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU IPM sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	IPM	Indeks	67.5	73.37	108.70

Jika dilihat dari tabel diatas, IPM Kabupaten Sikka meningkat nilainya tiap tahun, dan telah melampaui target akhir DPPMD 2024-2026. Meningkatnya pembangunan manusia di Kabupaten Sikka setiap tahunnya dikarenakan adanya kenaikan masing-masing komponen pembentuknya yaitu angka harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita. Walaupun IPM Kabupaten Sikka telah melampaui target akhir DPPMD 2024-2026, berbagai upaya meningkatkan IPM tetap dilakukan terutama dari dimensi Pendidikan melalui Peningkatan kualitas layanan

Pendidikan (mulai dari pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarannya).

Selanjutnya apabila IPM Kabupaten Sikka dibandingkan dengan IPM Kabupaten Flores Timur, IPM Kabupaten Ende, IPM Kabupaten Kupang, IPM Provinsi NTT serta IPM Nasional, maka IPM Kabupaten Sikka 73.37 lebih tinggi 4.23 dari IPM Provinsi NTT, lebih tinggi 3.58 dari IPM Kabupaten Flores Timur, lebih tinggi 1.13 dari IPM Kabupaten Ende, serta IPM Kabupaten Sikka lebih rendah 9.79 dari IPM Kabupaten Kupang dan lebih rendah 2.53 dari IPM Nasional. Grafik perbandingan IPM Kabupaten Sikka dengan IPM Kabupaten Flores Timur, IPM Kabupaten Ende, IPM Kabupaten Kupang, IPM Provinsi NTT serta IPM Nasional, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.1

Perbandingan IPM Kabupaten Sikka dengan IPM Kabupaten Flores Timur, IPM Kabupaten Ende, IPM Kabupaten Kupang, IPM Provinsi NTT serta IPM Nasional



Grafik 3.2

IPM Kabupaten Sikka Tahun 2023 – 2025



Untuk mendukung tujuan pertama, Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM, Didukung Oleh 7 (tujuh) sasaran antara lain:

- a. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat, dengan indikator Kinerja Sasaran (IKU):
 1. RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)
 2. HLS (Harapan Lama Sekolah)
 3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
- b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator Kinerja Sasaran (IKU): UHH (Usia Harapan Hidup)
- c. Menurunnya Angka Pengangguran, dengan indikator Kinerja Sasaran (IKU): Tingkat Pengangguran Terbuka
- d. Meningkatnya Kesenjangan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga, dengan indikator Kinerja Sasaran (IKU):
 1. IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)
 2. IDG (Indeks Development Gender)
 3. TFR (Total Fertility Rate)
- e. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan indikator Kinerja Sasaran (IKU): Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten

- f. Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah, dengan indikator Kinerja Sasaran (IKU):
 1. Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah
 2. Indeks Inovasi Daerah
 3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
- g. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga, dengan indikator Kinerja Sasaran (IKU): Persentase pemuda pelopor

(2) IKU : RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)

Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2025 tercapai 9.39 dari target 8.97 dengan capaian kinerja 104.68%. Realisasi RLS melebihi capaian target. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kate gori	Inter Pres Tasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	8.97	9.39	104.68	AA	SM

Apabila capaian realisasi RLS tahun 2025 sebesar 9.39 dibanding dengan capaian tahun 2023 yaitu 6.98, maka terdapat kenaikan 2.41 poin atau sekitar 34.5% dan dibanding dengan capaian tahun 2024 yaitu 9.22, maka terdapat kenaikan 0.17 poin atau sekitar 1.84%. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU RLS dapat dilihat pada tabel 3.10, berikut ini:

Tabel 3.10
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan
tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU RLS (Rata-Rata Lama
Sekolah)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	8.97	6.98	9.22

Dari Tabel diatas RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) selalu meningkat tiap tahunnya. Dengan realisasi tersebut menunjukkan bahwa rata rata anak di Kabupaten Sikka berusia 25 tahun keatas telah menempuh jenjang pendidikan selama 9.39 tahun atau kelas 9 (SMP atau sederajat). Grafik RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) Kabupaten Sikka tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik 3.3 dibawah ini:

Grafik 3.3
RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)
Kabupaten Sikka Tahun 2023- 2025



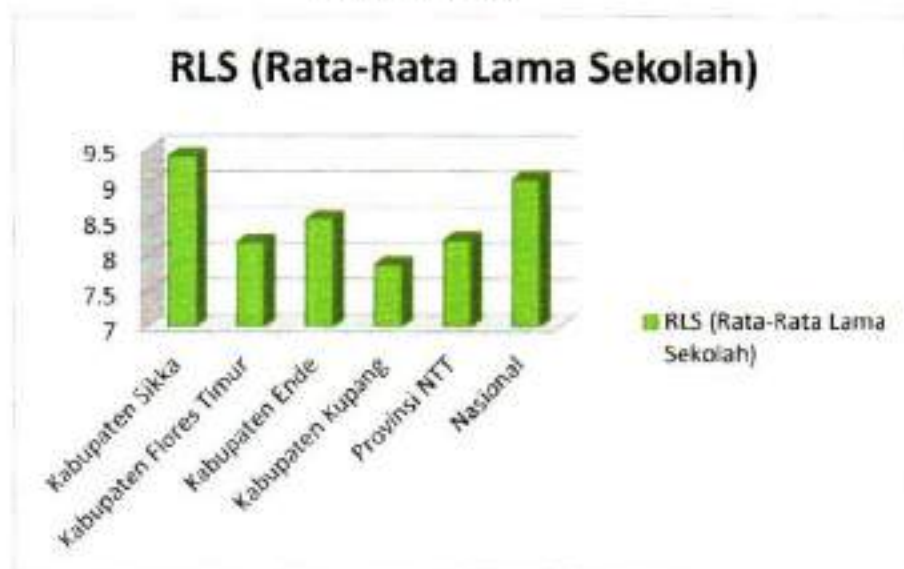
Selanjutnya jika realisasi RLS Tahun 2025 sebesar 9.39 dibandingkan dengan target akhir DPMD 2024-2026 sebesar 9.12 maka capaian realisasi ini melebihi capaian target akhir DPMD, dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU RLS
(Rata-Rata Lama Sekolah) sampai dengan tahun 2025
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah
Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	9.12	9.39	102.96

Selanjutnya apabila RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) Kabupaten Sikka dibandingkan dengan RLS Kabupaten Flores Timur, RLS Kabupaten Ende, RLS Kabupaten Kupang, RLS Provinsi NTT serta RLS Nasional, maka RLS Kabupaten Sikka 9.39 lebih tinggi 1.2 poin dari RLS Kabupaten Flores Timur, lebih tinggi 0.87 poin dari RLS Kabupaten Ende, lebih tinggi 1.52 dari RLS Kabupaten Kupang, lebih tinggi 1.17 dari RLS Provinsi NTT serta lebih tinggi 0.32 dari RLS Nasional. Grafik perbandingan RLS Kabupaten Sikka dibandingkan dengan RLS Kabupaten Flores Timur, RLS Kabupaten Ende, RLS Kabupaten Kupang, RLS Provinsi NTT serta RLS Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.4
Perbandingan RLS Kabupaten Sikka dibandingkan dengan RLS Kabupaten Flores Timur, RLS Kabupaten Ende, RLS Kabupaten Kupang, RLS Provinsi NTT dan RLS Nasional



Adapun upaya yang telah dilakukan agar RLS (Rata – Rata Lama Sekolah) dapat tercapai optimal, yaitu :

1. Membangun kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Pendidikan
2. Mengefektifkan pemanfaatan anggaran untuk peningkatan sarpras dan kualitas guru
3. Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan yang disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.
4. Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Penguatan partisipasi Pendidikan
6. Meningkatkan literasi anak melalui Pendidikan non-formal
7. Memfasilitasi masyarakat Kabupaten Sikka dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Terhadap kinerja yang belum tercapai Pemerintah Kabupaten Sikka akan terus berupaya memperbaikinya dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketersediaan Layanan Akses dan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
2. Peningkatan Kompetensi dan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai standar pelayanan Pendidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pembelajaran guna meningkatkan capaian hasil belajar siswa (Capaian Literasi dan Numerasi Peserta didik.
3. Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah serta sistim Monitoring dan supervisi pendidikan
4. Peningkatan Pembinaan Pengelolaan Kelembagaan Pendidikan Usia Dini dan Peningkatan Peran Serta Orang Tua dan Masyarakat serta koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah wilaya Desa dan Kelurahan serta Lembaga Penyelenggara PAUD untuk mendukung akses dan mutu Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Non Formal dan Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal serta Koordinasi dengan Pemerintah Wilayah Desa dan Kelurahan untuk pengembalian anak usia sekolah yang tidak sekolah

(3) IKU : HLS (Harapan Lama Sekolah)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 tercapai 16.17 dari target 15.51, dengan capaian kinerja 104.26%. Capaian realisasi HLS melebihi target yang ditetapkan. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU HLS (Harapan Lama Sekolah) dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU HLS (Harapan Lama Sekolah)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15.51	16.17	104.26	AA	SM

Apabila capaian realisasi HLS tahun 2025 sebesar 16.17 dibanding dengan capaian tahun 2023 yaitu 13.66 terdapat kenaikan 2.51 poin atau sekitar 18.3% dan dibanding dengan capaian tahun 2024 yaitu 16.01 terdapat kenaikan 0.16 poin atau sekitar 0,99%. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 IKU HLS (Harapan Lama Sekolah) dapat dilihat pada tabel 3.13, berikut ini:

Tabel 3.13
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025
dengan tahun 2023 dan tahun 2024 IKU HLS (Harapan Lama Sekolah)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15.51	13.66	16.01

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 13.66, tahun 2024 sebesar 16.01 serta tahun 2025 sebesar 16.17, berarti HLS selalu meningkat tiap tahunnya. Dengan realisasi 16.017 tahun ini menunjukkan bahwa rata-rata anak usia 7 tahun di Kabupaten Sikka yang masuk pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 16.17 tahun atau setara lulusan sekolah menengah atas atau sederajat. Kondisi ini menggambarkan kesempatan anak usia sekolah mengenyam pendidikan formal di Kabupaten Sikka dari tahun ke tahun semakin besar. Grafik HLS Kabupaten sikka Tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025 sebagai berikut:

Grafik 3.5
HLS Kabupaten Sikka Tahun 2023 - 2025



Selanjutnya jika realisasi HLS Tahun 2025 sebesar 16.17 dibandingkan dengan target akhir DPMD 2024-2026 sebesar 15.62 dan capaian realisasi HLS sebesar 103.52%. Capaian realisasi ini melebihi target akhir DPPMD, dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini:

Tabel 3.14
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU HLS sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15.62	16.17	103.52

Selanjutnya apabila HLS Kabupaten Sikka dibandingkan dengan HLS Kabupaten Flores Timur, HLS Kabupaten Ende, HLS Kabupaten Kupang, HLS Provinsi NTT serta HLS Nasional, maka HLS Kabupaten Sikka 16.17 lebih tinggi 3 dari HLS Kabupaten Flores Timur, lebih tinggi 2.33 dari HLS Kabupaten Ende, lebih tinggi 2.83 dari HLS Provinsi NTT, lebih tinggi 2.96 dari HLS Nasional dan lebih rendah 0.38 dari HLS Kabupaten Kupang. Grafik perbandingan HLS

Kabupaten Sikka dibandingkan dengan HLS Kabupaten Flores Timur, HLS Kabupaten Ende, HLS Kabupaten Kupang, HLS Provinsi NTT serta HLS Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.6
Perbandingan HLS Kabupaten Sikka dibandingkan dengan HLS Kabupaten Flores Timur, HLS Kabupaten Ende, HLS Kabupaten Kupang, HLS Provinsi NTT serta HLS Nasional



Adapun upaya yang telah dilakukan agar Rata – Rata Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu :

1. Membangun kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Pendidikan
2. Mengefektifkan pemanfaatan anggaran untuk peningkatan sarpras dan kualitas guru
3. Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan yang disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.
4. Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Penguatan partisipasi Pendidikan
6. Meningkatkan literasi anak melalui Pendidikan non-formal Memfasilitasi masyarakat Kabupaten Sikka dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Terhadap kinerja yang belum tercapai Pemerintah Kabupaten Sikka akan terus berupaya memperbaikinya dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketersediaan Layanan Akses dan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
2. Peningkatan Kompetensi dan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai standar pelayanan Pendidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pembelajaran guna meningkatkan capaian hasil belajar siswa (Capaian Literasi dan Numerasi Peserta didik).
3. Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah serta sistim Monitoring dan supervisi pendidikan.
4. Peningkatan Pembinaan Pengelolaan Kelembagaan Pendidikan Usia Dini dan Peningkatan Peran Serta Orang Tua dan Masyarakat serta koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah wilaya Desa dan Kelurahan serta Lembaga Penyelenggara PAUD untuk mendukung akses dan mutu Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Non Formal dan Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal serta Koordinasi dengan Pemerintah Wilayah Desa dan Kelurahan untuk pengembalian anak usia sekolah yang tidak sekolah.

(4) IKU : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah ukuran tingkat literasi masyarakat yang dicapai melalui pembangunan perpustakaan. IPLM merupakan hasil pengukuran dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat. Unsur-unsur IPLM, yaitu: pemerataan layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, ketersediaan tenaga perpustakaan, tingkat pemberdayaan layanan perpustakaan, ketersediaan layanan ber-SNP, dan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpus.

IPLM menjadi dasar untuk meningkatkan literasi masyarakat dan budaya literasi. Dengan meningkatnya literasi masyarakat, kualitas hidup masyarakat juga

dapat meningkat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2025 tercapai 48.66 dari target 13.00, dengan capaian 374.31%. Capaian Realisasi IPLM melebihi target yang sangat signifikan. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dapat dilihat pada tabel 3.15 di bawah ini:

Tabel 3.15
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	13.00	48.66	374.31	AA	SM

Apabila capaian realisasi IPLM tahun 2025 sebesar 48.66 dibanding dengan capaian tahun 2023 yaitu 10.86, maka terdapat kenaikan 37.86 atau sekitar 348.1% dan dibanding dengan capaian tahun 2024 yaitu 11.37, maka terdapat kenaikan 37.29 atau sekitar 328,0%. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.16
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	13.00	10.86	11.37

Grafik 3.7
IPLM Kabupaten Sikka Tahun 2023- 2025



Selanjutnya jika realisasi IPLM Tahun 2025 sebesar 48.66 dibandingkan dengan target akhir DPMD 2024-2026 sebesar 14.00 maka persentase capaian kinerja IPLM tahun 2025 sebesar 347.57%. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU IPLM sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut ini:

Tabel 3.17

Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU IPLM sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	14.00	48.66	347.57

Apabila IKU Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT serta Nasional, maka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Sikka sebesar 48.66 lebih tinggi 5.21 dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Flores Timur, lebih tinggi 3.31 dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Ende, lebih tinggi 19.27 dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Kupang, lebih rendah 11.87 dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi NTT dan lebih rendah 23.86 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dari nilai Nasional.

Perbandingan IKU Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dan Nasional, dapat dilihat pada grafik 3.8 di bawah ini:

Grafik 3.8

Perbandingan IPLM Kabupaten Sikka dengan IPLM Kabupaten Flores Timur, IPLM Kabupaten Ende, IPLM Kabupaten Kupang, IPLM Provinsi NTT dan IPLM Nasional



Adapun upaya yang telah dilakukan agar IPLM Kabupaten Sikka dapat tercapai optimal, yaitu :

1. Mendukung program dan kegiatan pembinaan perpustakaan
2. Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam peningkatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota.
3. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
4. Pemeliharaan Sarana Perpustakaan

(5) IKU : UHH (Usia Harapan Hidup)

Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Definisi dari indikator dimaksud adalah untuk mengukur dimensi umur panjang. Untuk dapat berumur panjang diperlukan kesehatan yang lebih baik. Dalam penghitungan IPM digunakan usia harapan hidup yang merupakan proksi umur panjang dan hidup sehat. Atau merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Usia Harapan Hidup Tahun 2025 tercapai 74.24 dari target 68.02 dengan capaian 109,73%. Dengan realisasi Usia Harapan Hidup 74.24 ini menunjukkan bahwa program-program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dalam hal ini Dinas Kesehatan cukup berhasil, perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan, berdampak pada tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Sikka ke arah yang lebih baik. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU UHH (Usia Harapan Hidup) dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut ini:

Tabel 3.18
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU UHH (Usia Harapan Hidup)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8

1	UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	68.02	74.24	109.73	AA	SM
---	--------------------------	-------	-------	-------	--------	----	----

Apabila capaian realisasi UHH tahun 2025 sebesar 74.24 dibanding dengan capaian tahun 2023 yaitu 68.30, maka terdapat kenaikan 5.94 atau sekitar 8.70% dan dibanding dengan capaian tahun 2024 yaitu 74,24, maka tidak mengalami perubahan atau sekitar 0.00%. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU UHH (Usia Harapan Hidup) tabel 3.19 berikut ini:

Tabel 3.19
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU UHH (Usia Harapan Hidup)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	68.02	68.30	74.24

Selanjutnya jika realisasi UHH Tahun 2025 sebesar 74.24 dibandingkan dengan target akhir DPMD 2024-2026 sebesar 68.20 maka persentase capaian kinerja UHH tahun 2025 sebesar 108.86%. Capaian ini melebihi target akhir DPMD, dapat dilihat pada tabel 3.20 di bawaht ini:

Tabel 3.20
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU UHH sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	68.20	74.24	108.86

Selanjutnya apabila UHH Kabupaten Sikka dibandingkan dengan UHH Kabupaten Flores Timur, UHH Kabupaten Ende, UHH Kabupaten Kupang, UHH Provinsi NTT serta UHH Nasional, maka UHH Kabupaten Sikka 74.24 lebih tinggi

8.03 dari UHH Kabupaten Flores Timur, lebih tinggi 7.94 dari UHH Kabupaten Ende, lebih tinggi 7.33 dari UHH Kabupaten Kupang, lebih tinggi 6.25 dari UHH Provinsi NTT serta lebih tinggi 1.85 dari UHH Nasional. Grafik UHH Kabupaten Sikka dibandingkan dengan UHH Kabupaten Flores Timur, UHH Kabupaten Ende, UHH Kabupaten Kupang, UHH Provinsi NTT serta UHH Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.9

UHH Kabupaten Sikka dibandingkan dengan UHH Kabupaten Flores Timur, UHH Kabupaten Ende, UHH Kabupaten Kupang, UHH Provinsi NTT serta UHH Nasional



Adapun upaya yang telah dilakukan agar UHH (Usia Harapan Hidup) dapat tercapai optimal, yaitu :

1. Penurunan jumlah kematian ibu dan anak serta peningkatan layanan lanjut usia melalui pemenuhan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan upaya promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
4. Membangun kerja sama antara pemerintah, masyarakat, Lembaga Kesehatan swasta, NGO untuk meningkatkan kualitas Kesehatan
5. Meningkatkan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan (puskesmas)

6. Penguatan partisipasi dan jaringan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap PHBS dan penyakit-penyakit degeneratif

(6) IKU 6 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sikka Tahun 2025 mencapai 2.33 dari target 4.45 dengan capaian 147.64%. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dapat dilihat pada tabel 3.21 di bawah ini:

Tabel 3.21
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)

N o	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Inter pres tasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.45	2.33	147.64	AA	SM

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sikka pada tahun 2025 sebesar 2.33% mengalami penurunan sebesar 0.29% jika dibandingkan dengan tahun 2023 (2.62%) dan pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan

(realisasinya sama). Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dilihat pada tabel 3.22 berikut ini:

Tabel 3.22
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,45	2,62	2,33

Selanjutnya jika realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 sebesar 2,33% dibandingkan dengan target akhir DPMD 2024-2026 sebesar 4,42% maka persentase capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 sebesar 147,29%. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Tingkat Pengangguran Terbuka sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.23 di bawah ini:

Tabel 3.23
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Tingkat Pengangguran Terbuka sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,42	2,33	147,29

Selanjutnya apabila TPT Kabupaten Sikka dibandingkan dengan TPT Kabupaten Flores Timur, TPT Kabupaten Ende, TPT Kabupaten Kupang, TPT Provinsi NTT serta TPT Nasional, maka TPT Kabupaten Sikka 2,33 lebih rendah

1.25 dari TPT Kabupaten Flores Timur, lebih tinggi 0.28 dari TPT Kabupaten Ende, lebih tinggi 1.03 dari TPT Kabupaten Kupang, lebih tinggi 0.69 dari TPT Provinsi NTT serta lebih tinggi 2.58 dari TPT Nasional. Perbandingan TPT Kabupaten Sikka, TPT Kabupaten Flores Timur, TPT Kabupaten Ende, TPT Kabupaten Kupang, TPT Provinsi NTT serta TPT Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.10

Perbandingan TPT Kabupaten Sikka, TPT Kabupaten Flores Timur, TPT Kabupaten Ende, TPT Kabupaten Kupang, TPT Provinsi NTT serta TPT Nasional Tahun 2025



Adapun upaya yang telah dilakukan agar menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) , yaitu antara lain:

- melakukan penguatan hubungan industrial, dengan fasilitasi mediasi antara pekerja dan perusahaan agar terjadi harmonisasi yang diharapkan dapat menekan angka pemutusan kerja atau PHK ,
- melakukan pelatihan pengembangan ketrampilan agar para pencari kerja dapat membuka peluang usaha.
- Peningkatan kesempatan kerja dengan memanfaatkan informasi pasar kerja

(7) IKU : IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)

Indeks Pemberdayaan Gender adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pemberdayaan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. Indeks Pemberdayaan Gender digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai Indeks Pemberdayaan Gender sama dengan Indeks Pembangunan Manusia

IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Sikka Tahun 2025 mencapai 66.73 dari target 89.20 dengan capaian 74.81%. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU IPG (Indeks Pemberdayaan Gender), sebagai berikut:

Tabel 3.24
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)

N o	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Real isasi	% Capaian Kinerja	Kate gori	Inter pres tasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	89.20	66.73	74.81	BB	SB

IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) di Kabupaten Sikka pada tahun 2025 sebesar 66.73% mengalami penurunan sebesar 22.0% jika dibandingkan dengan IPG tahun 2023 (88.81%) dan mengalami penurunan sebesar 23.1% jika dibandingkan dengan IPG tahun 2024 (89.87%). Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 Indikator Tujuan/ IKU IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) dapat dilihat pada tabel 3.25, di bawah ini:

Tabel 3.25
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun
2024 Indikator Tujuan/ IKU IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6

I	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	89.20	88.81	89.87
---	----------------------------------	--------	-------	-------	-------

Selanjutnya jika realisasi IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Tahun 2025 sebesar 66.73% dibandingkan dengan target akhir DPPMD 2024-2026 sebesar 89.25% maka persentase capaian kinerja IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) tahun 2025 sebesar 74.77%. Realisasi IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Tahun 2025 tidak melebihi target akhir DPPMD 2024-2026 sebesar 22.5%. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.26 di bawah ini:

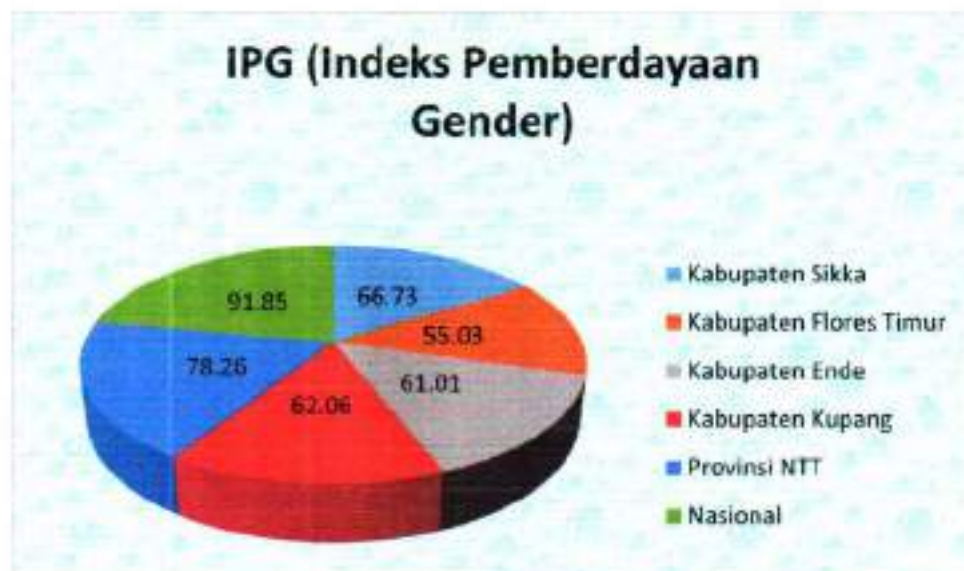
Tabel 3.26
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	89.25	66.73	74.77

Selanjutnya apabila IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Sikka dibandingkan dengan IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Flores Timur, IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Ende, IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Kupang, IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Provinsi NTT serta IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Nasional, maka IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Sikka 66.73 lebih tinggi 11.7 poin dari IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Flores Timur, lebih tinggi 5.72 poin dari IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Ende, lebih tinggi 4.67 poin dari IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Kupang, lebih rendah 11.53 poin dari IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Provinsi NTT serta lebih rendah 25.12 poin dari IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Nasional.

Perbandingan IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Sikka dengan IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Flores Timur, IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Ende, IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Kupang, IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Provinsi NTT serta IPG (Indeks Pembangunan Gender) Nasional, dapat dilihat pada grafik 3.12 berikut ini:

Grafik 3.11
Perbandingan IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Sikka dengan IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Flores Timur, IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Ende, IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Kupang, IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Provinsi NTT serta IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) Nasional Tahun 2025



Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) , yaitu antara lain:

- 1) Sinergitas antara pemerintah dan kelompok/lembaga peduli perempuan dan anak dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pendampingan dan rehabilitasi korban kekerasan
- 2) Memanfaatkan dukungan program dan anggaran pemerintah pusat untuk penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana dan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas penyuluh lapangan KB dan KIE
- 3) Melaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

- 4) Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- 5) Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
- 6) Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi

(8) IKU : IDG (Indeks Development Gender)

Indeks Development Gender (IDG) adalah ukuran untuk menilai sejauh perempuan terlibat aktif dalam peran strategis, seperti pengambilan keputusan, politik dan ekonomi.

Indeks Development Gender (IDG) Kabupaten Sikka Tahun 2025 mencapai 89.87 dari target 62.57 dengan capaian 143.63%. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Indeks Development Gender (IDG) dapat dilihat pada tabel 3.27 berikut ini:

Tabel 3.27
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU Indeks Development Gender (IDG)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IDG (Indeks Development Gender)	Indeks	62.57	89.87	143.63	AA	SM

Indeks Development Gender (IDG) di Kabupaten Sikka pada tahun 2025 sebesar 89.87 mengalami peningkatan sebesar 27.32 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 62.55 dan dibanding dengan capaian tahun 2024 yaitu 65.01, maka terdapat kenaikan 24.86. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Development Gender (IDG) dapat dilihat pada tabel 3.28, di bawah ini:

Tabel 3.28

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Development Gender (IDG)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	IDG (Indeks Development Gender)	Indeks	62.57	62.55	65.01

Selanjutnya jika realisasi Indeks Development Gender (IDG) Tahun 2025 sebesar 89.87 dibandingkan dengan target akhir DPPMD 2024-2026 sebesar 62.6, maka diperoleh persentase capaian kinerja Indeks Development Gender (IDG) sebesar 103.85%. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Indeks Development Gender (IDG) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.29 berikut ini:

Tabel 3.29

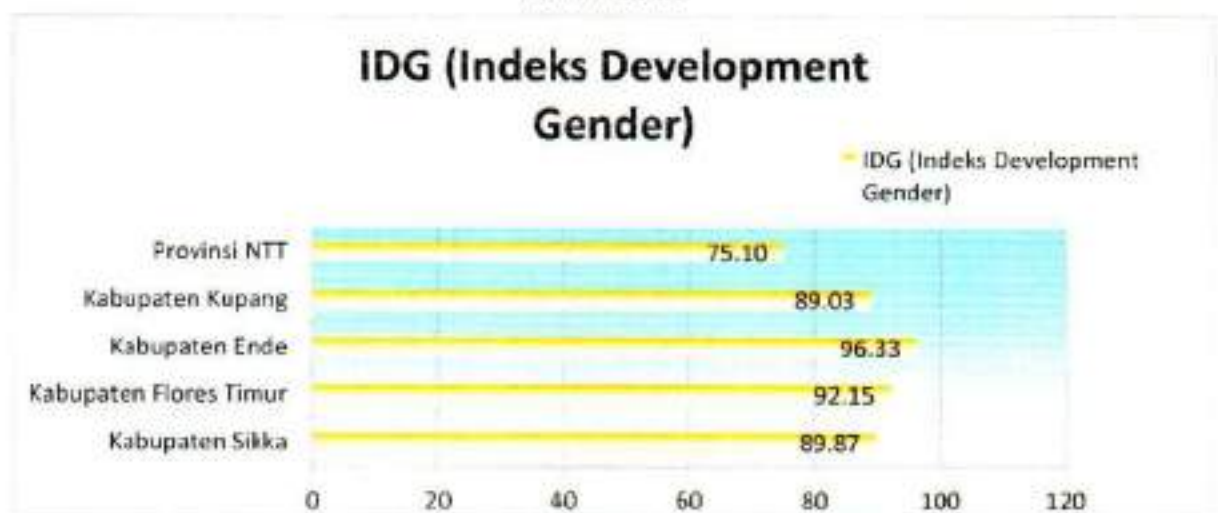
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Indeks Development Gender (IDG) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	IDG (Indeks Development Gender)	Indeks	62.6	65.01	103.85

Selanjutnya IDG (Indeks Development Gender) Kabupaten Sikka dapat dibandingkan dengan IDG (Indeks Development Gender) Kabupaten Flores Timur, IDG (Indeks Development Gender) Kabupaten Ende, IDG (Indeks Development Gender) Kabupaten Kupang, maupun IDG (Indeks Development Gender) provinsi NTT. Sedangkan IDG (Indeks Development Gender) Nasional tidak dapat dibandingkan sebab ketiadaan data. Jika IDG (Indeks Development

Gender) Kabupaten Sikka sebesar 65.01 dibandingkan dengan IDG (Indeks Development Gender) Kabupaten Flores Timur, maka IDG (Indeks Development Gender) Kabupaten Sikka lebih rendah 2.28 poin, lebih rendah 6.46 poin dari IDG (Indeks Development Gender) Kabupaten Ende, lebih tinggi 0.84 poin dari IDG (Indeks Development Gender) Kabupaten Kupang dan lebih tinggi 14.77 poin dari IDG (Indeks Development Gender) Provinsi NTT. Perbandingan Indeks Development Gender (IDG) Kabupaten Sikka dengan Indeks Development Gender (IDG) Kabupaten Flores Timur, Indeks Development Gender (IDG) Kabupaten Ende, Indeks Development Gender (IDG) Kabupaten Kupang dan Indeks Development Gender (IDG) Provinsi NTT Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik 3.13 berikut ini.

Grafik 3.12
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Sikka dengan Indeks Development Gender (IDG) Kabupaten Flores Timur, Indeks Development Gender (IDG) Kabupaten Ende, Indeks Development Gender (IDG) Kabupaten Kupang dan Indeks Development Gender (IDG) Provinsi NTT Tahun 2025



Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sikka, yaitu :

- 1) Sinergitas antara pemerintah dan kelompok/lembaga peduli perempuan dan anak dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pendampingan dan rehabilitasi korban kekerasan

- 2) Memanfaatkan dukungan program dan anggaran pemerintah pusat untuk penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana dan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas penyuluh lapangan KB dan KIE
- 3) Melaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
- 4) Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- 5) Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
- 6) Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi

(9) IKU : TFR (Total Fertility Rate)

TFR (Total Fertility Rate) berarti angka Kelahiran Total. TFR merupakan perkiraan jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun).

TFR (Total Fertility Rate) Kabupaten Sikka Tahun 2025 mencapai 2.19 dari target 2.58 dengan capaian 84.88%. Realisasi Angka TFR (Total Fertility Rate) sebesar 2.19 berada diatas standar TFR sebesar 2.1, hal ini menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan penduduk. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU TFR (Total Fertility Rate) dapat dilihat pada tabel 3.30 berikut ini:

Tabel 3.30
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
tahun 2025 IKU TFR (Total Fertility Rate)

N o	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2.58	2.19	84.88	A	M

TFR (Total Fertility Rate) di Kabupaten Sikka pada tahun 2025 sebesar 2.19 tidak mengalami peningkatan atau perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2.19 dan dibanding dengan capaian tahun 2024 yaitu

2.55, maka mengalami peningkatan atau sebesar 14,1%. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU TFR (Total Fertility Rate) dapat dilihat pada tabel 3.31, berikut ini:

Tabel 3.31
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU TFR (Total Fertility Rate)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	TFR (Total Fertility Rate)	angka	2.58	2.19	2.55

Selanjutnya jika realisasi TFR (Total Fertility Rate) Tahun 2025 sebesar 2.19 dibandingkan dengan target akhir DPMD 2024-2026 sebesar 2.57, maka persentase capaian kinerja TFR (Total Fertility Rate) tahun 2025 sebesar 85.21%. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU TFR (Total Fertility Rate) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.32 berikut ini:

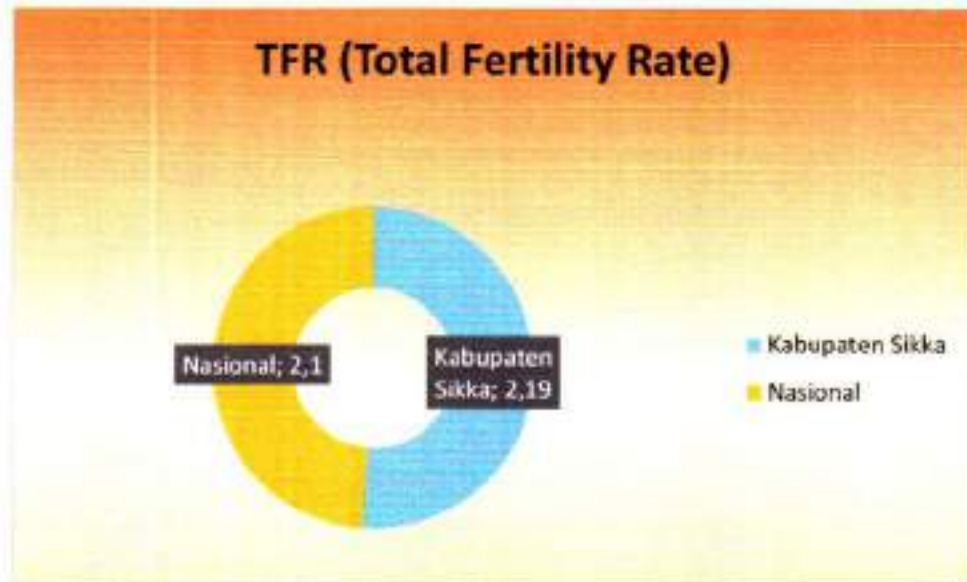
Tabel 3.32
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU TFR (Total Fertility Rate) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	TFR (Total Fertility Rate)	angka	2.57	2.19	85.21

Selanjutnya apabila TFR (Total Fertility Rate) Kabupaten Sikka dibandingkan dengan TFR (Total Fertility Rate) Nasional, maka TFR (Total Fertility Rate) Kabupaten Sikka sebesar 2.19 lebih besar dari pada TFR (Total Fertility Rate) Nasional sebesar 0.09. Namun demikian TFR (Total

Fertility Rate) Kabupaten Sikka dinyatakan terjadi pertumbuhan penduduk karena berada di atas angka standar TFR (Total Fertility Rate). Perbandingan TFR (Total Fertility Rate) Kabupaten Sikka dan TFR (Total Fertility Rate) Nasional Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik 3,14 di bawah ini:

Grafik 3.13
Perbandingan TFR (Total Fertility Rate) Kabupaten Sikka
Kabupaten Sikka dan TFR (Total Fertility Rate) Nasional Tahun 2025



Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan TFR (Total Fertility Rate) Kabupaten Sikka, yaitu :

- Penyediaan Data Dan Informasi Keluarga sebagai dasar untuk dilakukan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
- Melaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
- Melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui kegiatan Promosi dan Sosialisasi

Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

(10) IKU : Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten

Rasio konsumsi normatif adalah jumlah pangan yang harus dikonsumsi seseorang per hari untuk mendapatkan energi dari pangan tersebut. Rasio ini merupakan petunjuk kecukupan pangan suatu wilayah. Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah Kabupaten Sikka tahun 2025 mencapai 1.18 dari target 0.53 dengan capaian 222.64%. Berdasarkan realisasi rasio konsumsi normatif Kabupaten Sikka yang dicapai berada di angka 1 kebawah, menunjukkan bahwa ketersediaan pangan sebanding dengan kebutuhan. Dan Kabupaten Sikka masuk dalam kategori perekonomian yang stabil, sebab ketersediaan pangan di Kabupaten Sikka sebanding dengan kebutuhan.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten dapat dilihat pada tabel 3.33 berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung,
ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	Nilai Rasio	0.53	1.18	222.64	AA	SM

Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah di Kabupaten Sikka pada tahun 2025 sebesar 1.18 mengalami peningkatan sebesar 0.53 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0.65. dan dibanding dengan capaian tahun 2024 yaitu 0.79, maka mengalami peningkatan sebesar 0.39. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten dapat dilihat pada tabel 3.34, berikut ini:

Tabel 3.34

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024 Indikator Tujuan/ IKU Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	Nilai Rasio	0.53	0.65	0.79

Selanjutnya jika realisasi Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten tahun 2025 sebesar 1.18 dibandingkan dengan target akhir DPMD 2024-2026 sebesar 0.49 dan persentase capaian kinerja tahun 2025 sebesar 240.82%. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.35 di bawah ini:

Tabel 3.35

Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	Nilai Rasio	0.49	1.18	240.82

Selanjutnya Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten dibandingkan dengan Standar Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten tidak dapat dibandingkan dengan Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, juga dengan Provinsi NTT bahkan secara Nasional karena Rasio konsumsi normatif tersebut belum dirilis.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten Sikka, yaitu:

- 1) Peningkatan koordinasi antar daerah untuk ketahanan pangan
- 2) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal
- 3) Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan lokal di masyarakat.
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana untuk memperkuat ketersediaan pangan lokal
- 5) Optimalisasi pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan bagi masyarakat dan pelaku usaha

(11) IKU : Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah

Hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah yang dilihat dari Jumlah penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Sikka selama periode 2024 dibandingkan dengan jumlah hasil penelitian yang digunakan untuk pengambilan kebijakan. Hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sikka dari sampai dengan 2022 adalah 50%.

Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah Sikka Tahun 2025 mencapai 100 dari target 75.00 dengan capaian 133.33%. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 3.36 berikut ini:

Tabel 3.36
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Inter prestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	%	75.00	100	133.33	AA	SM

Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023. Sebab pada tahun 2023 tidak dilakukan pengukuran terhadap indikator ini. Oleh karena itu guna diketahui perbandingan indikator persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah digunakan capaian pada kondisi awal tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah daerah Tahun 2024-2026 dengan angka 50%. Sehingga perbandingan persentase hasil penelitian yang

ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2024 sebesar 72.73 mengalami peningkatan sebesar 22.73% jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2022 sebesar 50%. Sedangkan dibanding dengan capaian tahun 2024 yaitu 72,73, maka mengalami peningkatan sebesar 27.27 atau sekitar 37.5%. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan kondisi awal tahun 2022 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 3.37 berikut ini:

Tabel 3.37
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	%	75.00	-	72.73

Selanjutnya jika realisasi persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 sebesar 100% dibandingkan dengan target akhir DPMD 2024-2026 sebesar 80% diperoleh persentase capaian kinerja tahun 2025 sebesar 125%. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.38 di bawah ini:

Tabel 3.38

Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	%	80	100	125.00

Selanjutnya IKU Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah tidak dilakukan pengukuran dengan Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dan Nasional, karena tidak adanya data tersebut.

Kurangnya partisipasi perangkat daerah/lembaga dalam upaya penciptaan inovasi daerah merupakan kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai indeks inovasi daerah, yakni:

1. Mendorong perangkat daerah dan berbagai Lembaga untuk menghasilkan inovasi daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah/kepala perangkat daerah/Lembaga terkait.
2. Pemberian reward sebagai bentuk motivasi bagi perangkat daerah dan lembaga untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pelayanan publik dan kelancaran ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

(12) IKU : Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah alat ukur perkembangan inovasi di pemerintahan daerah. Inovasi Daerah sebagai dasar perbaikan pembangunan

pemerintahan daerah agar dapat maju dan berdaya saing. Penilaian dilakukan dengan tahapan: (a). penjaringan; (b). pengukuran indeks; (c). presentasi; dan (d). validasi lapangan. Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Sikka sampai dengan 2022 adalah 43,28. Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 mencapai 49.35 (kategori kurang inovatif) dari target 65.00 dengan capaian 75.92%. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Indeks Inovasi Daerah dapat dilihat pada tabel 3.39 berikut ini:

Tabel 3.39
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU Indeks Inovasi Daerah

N o	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realis asi	% Capaian Kinerja	Kate gori	Inter pres tasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65.00	49.35	75.92	BB	SB

Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Sikka pada tahun 2025 sebesar 49.35 mengalami peningkatan sebesar 7.36 poin jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 41.99 dan mengalami peningkatan sebesar 14.62 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 34.73. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Inovasi Daerah dapat dilihat pada tabel 3.40, berikut ini:

Tabel 3.40
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun
2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Inovasi Daerah

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65.00	41.99	34.73

Selanjutnya jika realisasi IKU Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 sebesar 49.35 dibandingkan dengan target akhir DPMD 2024-2026 sebesar 70 maka persentase capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 sebesar 70.50%.

realisasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 tidak mencapai target akhir DPMD 2024-2026. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Indeks Inovasi Daerah sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.41 berikut ini:

Tabel 3.41
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Indeks Inovasi Daerah sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	70.00	49.35	70.50

Apabila IKU Indeks Inovasi Daerah dibandingkan dengan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dan Nasional, maka Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sikka sebesar 49.35 lebih tinggi 7.02 poin dari Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur, lebih tinggi 33.55 poin dari Kabupaten Ende, lebih rendah 0.75 poin dari Provinsi NTT, lebih rendah 15.66 dari Nasional. Sedangkan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kupang tidak dapat dibandingkan sebab ketiadaan data. Perbandingan IKU Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT dan Nasional, dapat dilihat pada grafik 3.15 di bawah ini:

Grafik 3.14
Perbandingan IKU Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2025



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai indeks inovasi daerah, yakni:

1. Mendorong perangkat daerah dan berbagai Lembaga untuk menghasilkan inovasi daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah/kepala perangkat daerah/Lembaga terkait.
2. Pemberian reward sebagai bentuk motivasi bagi perangkat daerah dan lembaga untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pelayanan publik dan kelancaran ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

(13) IKU : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

IPKD merupakan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebesar 56,1.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2025 mencapai 63.51 dari target 70.00 dengan capaian 90.73%. Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tidak melebihi target yang ditetapkan sebesar 6.49 poin. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dapat dilihat pada tabel 3.42 di bawah ini.

Tabel 3.42
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realis asi	% Capaian Kinerja	Kate gori	Inter pres tasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	70.00	63.51	90.73	AA	SM

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Kabupaten Sikka pada tahun 2025 sebesar 63.51 mengalami penurunan sebesar 14.5 poin jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 78.019. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun

2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dapat dilihat pada tabel 3.43, berikut ini:

Tabel 3.43
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	70.00	78.019	78.019

Selanjutnya jika realisasi IKU Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2025 sebesar 63.51 dibandingkan dengan target akhir DPPMD 2024-2026 sebesar 80.00 maka persentase capaian kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2024 sebesar 79.39%. realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2024 tidak mencapai target akhir DPPMD 2024-2026.

Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.44 di bawah ini:

Tabel 3.44
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	80.00	63.51	79.39

Selanjutnya IKU Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tidak dilakukan pengukuran dengan Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dan Nasional, sebab ketiadaan data.

(14) IKU : Persentase pemuda pelopor

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat UUD 1945 berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian. Organisasi kepemudaan merupakan sebuah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik menjadi pemuda pelopor. Pemuda pelopor adalah mereka yang kreatif untuk mewujudkan gagasan menjadi sebuah karya atau kerja nyata. Persentase Pemuda pelopor Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2022 sebesar 60%.

Realisasi IKU Persentase Pemuda Pelopor Tahun 2025 mencapai 57.40% dari target 70.00% dengan capaian 82.00%. Realisasi Persentase Pemuda Pelopor. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Persentase Pemuda Pelopor, dapat dilihat pada tabel 3.45 berikut ini:

Tabel 3.45
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU Persentase Pemuda Pelopor

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Inter prestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase Pemuda Pelopor	%	70.00	57.40	82.00	AA	SM

Persentase Pemuda Pelopor di Kabupaten Sikka pada tahun 2025 sebesar 57.40% mengalami penurunan sebesar 31.6% jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi sebesar 89.00% dan mengalami penurunan sebesar 7.6% jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar 65.00%. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 Indikator Tujuan/ IKU Persentase Pemuda Pelopor dapat dilihat pada tabel 3.46, berikut ini:

Tabel 3.46
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Persentase Pemuda Pelopor

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	Persentase Pemuda Pelopor	%	70.00	89.00	65.00

Selanjutnya jika realisasi IKU Persentase Pemuda Pelopor Tahun 2025 sebesar 57.40% dibandingkan dengan target akhir DPMD 2024-2026 sebesar 75.00% maka persentase capaian kinerja Persentase Pemuda Pelopor tahun 2025 sebesar 76.53%. realisasi Persentase Pemuda Pelopor Tahun 2024 tidak mencapai target akhir DPPMD 2024-2026.

Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Persentase Pemuda Pelopor sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.47 di bawah ini:

Tabel 3.47
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU IKU Persentase Pemuda Pelopor sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Persentase pemuda pelopor	%	75.00	57.40	76.53

(15) IKU : Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah indikator ekonomi yang menunjukkan rata-rata pengeluaran konsumsi per orang dalam suatu wilayah atau Negara dan disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP). Pengeluaran per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, membandingkan tingkat hidup antar wilayah, dan menganalisis pola konsumsi.

Pengeluaran per kapita dihitung dengan membagi total pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan jumlah penduduk. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sikka Tahun 2025 mencapai Rp 93,632.42 dari target Rp 1,015,646.17 dengan capaian 9.219%. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 IKU Pengeluaran Per Kapita dapat dilihat pada tabel 3.48 berikut ini:

Tabel 3.48
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU Pengeluaran Per Kapita

N o	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kate gori	Inter pres tasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	1,015,646.17	93,632.42	9.219	D	SK

Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Sikka pada tahun 2025 sebesar Rp.93,632.42 mengalami penurunan sebesar Rp.779.77 jika dibandingkan dengan

tahun 2023 sebesar Rp.873,304 dan mengalami penurunan sebesar Rp.843.84 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp.937,480. Menurunnya Pengeluaran Perkapita sebesar Rp.779.77 pada tahun 2023 dan Rp.843.84 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Sikka semakin rendah. Dengan menurunnya daya beli maka masyarakat Kabupaten Sikka semakin tidak sejahtera. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Pengeluaran Per Kapita dapat dilihat pada tabel 3.49, berikut ini:

Tabel 3.49
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Pengeluaran Per Kapita

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	1,015,646.17	873,304	937,480

Selanjutnya jika realisasi Pengeluaran Per Kapita Tahun 2025 sebesar Rp 93,632.42 dibandingkan dengan target akhir DPPMD 2024-2026 sebesar Rp1.117.210.79 dan persentase capaian kinerja Pengeluaran Per Kapita tahun 2024 sebesar 8.38%. Dari data ini terlihat bahwa pada tahun 2025 realisasi Pengeluaran Per Kapita tidak mencapai target. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Pengeluaran Per Kapita sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.50 di bawah ini:

Tabel 3.50
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Pengeluaran Per Kapita sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

N o	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	1,117,210.79	93,632.42	8.38

Grafik 3.15
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Pengeluaran Per Kapita sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026



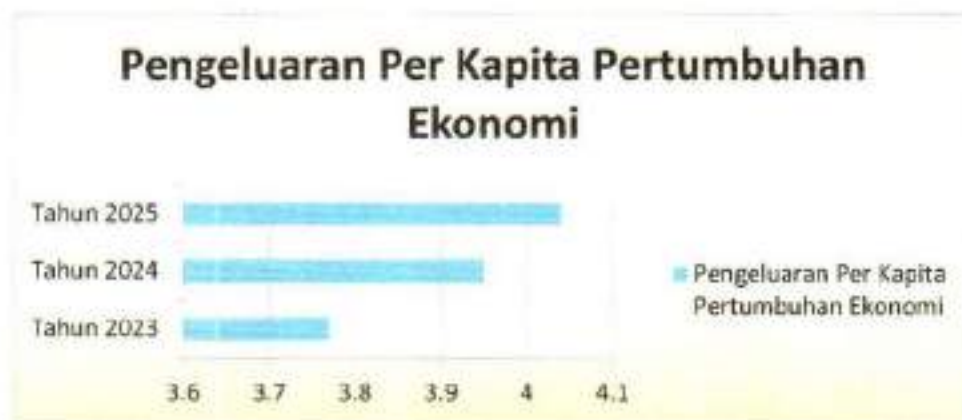
Adapun upaya yang telah dilakukan agar Pengeluaran Per Kapita dapat tercapai optimal, yaitu :

1. Membangun kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan kualitas kesehatan.
2. Mengefektifkan pemanfaatan anggaran untuk peningkatan sarpras dan kualitas guru dan kualitas tenaga kesehatan
3. Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan dan mutu kesehatan yang disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.
4. Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Penguatan partisipasi Pendidikan
6. Meningkatkan literasi anak melalui Pendidikan non-formal Memfasilitasi masyarakat Kabupaten Sikka dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(16) IKU : Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada grafik 3.18 berikut :

Grafik 3.16
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2023-2025



Dari Grafik diatas dapat dirincikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 4.28 dari target 4.04 Artinya capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka melebihi target yang ditetapkan sebesar 0.24 poin dengan capaian kinerja sebesar 105.94%. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tabel 3.51 berikut ini:

Tabel 3.51
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kate gori	Interpres tasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.04	4.28	105.94	AA	SM

Selanjutnya capaian realisasi Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar 4.28 dibanding dengan capaian tahun 2023 sebesar 3.77 maka terdapat kenaikan 0.51 poin atau sekitar 13.5% dan dibanding dengan capaian tahun 2024

sebesar 3.95 maka terdapat kenaikan 0.33 poin atau sekitar 8.35%. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tabel 3.52, berikut ini:

Tabel 3.52
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.04	3.77	3.95

Dari tabel diatas Pertumbuhan Ekonomi selalu meningkat tiap tahunnya. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi karena meningkatnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Meningkat konsumsi berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut jika realisasi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 sebesar 4.28 dibandingkan dengan target akhir DPPMD 2024-2026 sebesar 4.30 maka indikator Pertumbuhan Ekonomi dikatakan belum mencapai target. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Pertumbuhan Ekonomi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 3.53 berikut ini:

Tabel 3.53
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Pertumbuhan Ekonomi sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024 - 2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.30	4.28	99.53

Selanjutnya apabila Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur,

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ende, dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT serta Pertumbuhan Ekonomi Nasional, maka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka lebih tinggi 1.59 poin dari Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur, lebih tinggi 0.4 poin dari Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ende, dan lebih tinggi 1.25 poin dari Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT serta lebih rendah 0.74 poin dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional, sedangkan Kabupaten Kupang tidak dapat dibandingkan sebab ketiadaan data. Secara rinci grafik perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ende, dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT serta Pertumbuhan Ekonomi Nasional dapat dilihat pada grafik 3.18 berikut ini :

Grafik 3.17

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, dan Provinsi NTT serta Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Upaya yang dilakukan agar Pertumbuhan Ekonomi dapat tercapai optimal, yaitu :

1. Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengelolaan PAD
2. Meningkatkan daya tarik investasi dan PAD dengan memanfaatkan letak Kabupaten Sikka yang strategis dan didukung dengan potensi sektor perikanan, pertanian, peternakan, pariwisata dan perindustrian

3. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor perikanan, pertanian, peternakan, potensi destinasi pariwisata dan perindustrian sesuai permintaan pasar dengan memanfaatkan ketersediaan infrastruktur darat, laut dan udara
4. Mengoptimalkan kerja tim pengendali inflasi untuk mengendalikan inflasi daerah

(17) IKU : Jumlah Nilai Investasi

Pelaksanaan urusan penanaman modal di Kabupaten Sikka dapat dilihat dari Nilai investasi. Nilai investasi akhir pada tiap-tiap tahunnya berkurang sebesar penyusutan. Sedangkan nilai biasanya investasi merupakan penjumlahan investasi awal ditambah akhir dibagi dua. Perhitungan biasanya rate of return diperoleh dengan cara membagi biasanya laba sesudah pajak dengan investasi. Nilai investasi terdiri dari Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) dan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA).

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) di Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nilai Investasi sebesar Rp838.307.206.500, pada Tahun 2021 sebesar Rp3.899.787.555 dan pada Tahun 2022 sebesar Rp211.135.781.771 dan tahun 2023 Nilai Investasi sebesar Rp109.756.256.001. Sedangkan Jumlah Nilai Investasi PMA di Kabupaten Sikka Tahun 2022 sebesar Rp20.556.602.309 yang bersumber dari 4 perusahaan asing yang menanamkan modal. Invenstasi PMA di Kabupaten Sikka masih didominasi perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan serta ekspor dan impor hasil alam seperti komoditi pertanian dan perkebunan serta hasil laut dan nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp348.339.846.508.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Jumlah Nilai Investasi difokuskan pada investasi yang bersumber dari PMDN, dapat dilihat pada tabel 3.54 berikut ini:

Tabel 3.54
Perbandingan antara target dan realisasi
kinerja tahun 2025 IKU Jumlah Nilai Investasi

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Nilai Investasi	Milyar Rupiah	225,000,000,000	65,000,000,000	29.55	D	SK

Selanjutnya capaian realisasi Jumlah Nilai Investasi tahun 2025 sebesar Rp.65,000,000,000 dibanding dengan capaian tahun 2023 sebesar Rp.458,096,102,509 maka terdapat penurunan jumlah nilai investasi sebesar Rp.393,096,102,509 dan dibanding dengan capaian tahun 2024 sebesar Rp.48,040,892,683 maka terdapat peningkatan jumlah nilai investasi sebesar Rp.16,959,107,317 yang bersumber dari PMDN, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.55 berikut ini :

Tabel 3.55
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Jumlah Nilai Investasi

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Nilai Investasi	Milyar Rupiah	220,000,000,000	458,096,102,509	48,040,892,683

Lebih lanjut jika realisasi Jumlah Nilai Investasi Tahun 2025 sebesar Rp.65,000,000,000 dibandingkan dengan target akhir DPPMD 2024-2026 sebesar Rp.225.000.000.000 maka indikator Jumlah Nilai Investasi dikatakan belum mencapai target. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Jumlah Nilai Investasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 3.56 berikut ini:

Tabel 3.56
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Jumlah Nilai Investasi sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

N o	Indikator Kinerja Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024 – 2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	Jumlah Nilai Investasi	Milyar Rupiah	225,000,000,000	65,000,000,000	28.89

Grafik Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Jumlah Nilai Investasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada grafik 3.18 di bawah ini :

Grafik 3.18
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Jumlah Nilai Investasi sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026



Selanjutnya indikator Jumlah Nilai Investasi Kabupaten Sikka tidak diukur oleh Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT serta Jumlah Nilai Investasi Nasional, sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Nasional maupun Daerah Lain. Upaya yang dilakukan agar Jumlah Nilai Investasi dapat tercapai optimal, yaitu :

1. Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengelolaan PAD
2. Meningkatkan daya tarik investasi dan PAD dengan memanfaatkan letak Kabupaten Sikka yang strategis dan didukung dengan potensi sektor perikanan, pertanian, peternakan, pariwisata dan perindustrian
3. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor perikanan, pertanian, peternakan, potensi destinasi pariwisata dan perindustrian sesuai permintaan pasar dengan memanfaatkan ketersediaan infrastruktur darat, laut dan udara
4. Mengoptimalkan kerja tim pengendali inflasi untuk mengendalikan inflasi daerah

(18) IKU : Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam membiayai belanja daerah. Berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Selanjutnya ukuran ini dinyatakan sebagai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2025 mencapai 710.67 dari target 10.89 dengan capaian 97.98%. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada tabel 3.57 berikut ini:

Tabel 3.57
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU Derajat Desentralisasi Fiskal

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	10.89	10.67	97.98	A	M

Selanjutnya capaian realisasi Derajat Desentralisasi Fiskal tahun 2025 sebesar 10.67 dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 9.16 maka terdapat peningkatan Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 1.51 dan dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 8.24 maka terdapat peningkatan Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 2.43, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.58 berikut ini :

Tabel 3.58
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Derajat Desentralisasi Fiskal

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	10.89	9.16	8.24

Lebih lanjut realisasi Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2025 sebesar 10.67 dibandingkan dengan target akhir DPPMD 2024-2026 sebesar 11.59 maka indikator Derajat Desentralisasi Fiskal dikatakan belum mencapai target. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Derajat Desentralisasi Fiskal sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 3.59 berikut ini:

Tabel 3.59
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Derajat Desentralisasi fiskal sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024 – 2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	11.59	10.67	92.06

Grafik Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Derajat Desentralisasi fiskal sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada grafik 3.20 dibawah ini :

Grafik 3.29

Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Derajat Desentralisasi fiskal sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026



Selanjutnya indikator Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sikka tidak dapat dibandingkan dengan Derajat Desentralisasi fiskal Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT serta Derajat Desentralisasi fiskal Nasional, karena sebab ketiadaan data.

Upaya yang dilakukan agar Derajat Desentralisasi fiskal dapat tercapai optimal, yaitu dengan

1. Meningkatkan PAD
2. Mengoptimalkan kualitas pengelolaan keuangan
3. Menentukan alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah
4. Membatasi alokasi belanja pegawai

(19) IKU : Persentase Penduduk Miskin

Tujuan ke-2 Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana tertuang dalam DPPMD 2024-2026 dengan sasarannya Menurunkan angka kemiskinan, yang diukur melalui kinerja indikator kinerja utama, salah satu indikatornya adalah Persentase Penduduk Miskin.

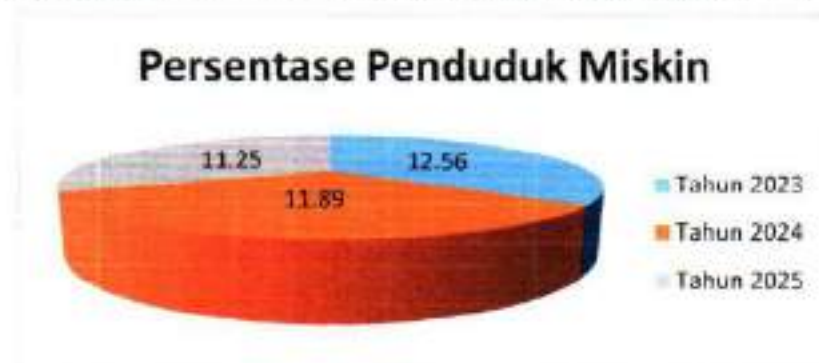
Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dan

kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, perumahan, sandang, pekerjaan, dan sebagainya.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap daerah, termasuk Kabupaten Sikka. Kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan selain pengangguran. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, dalam menentukan target penduduk miskin serta penanggulangan terhadap kondisi penduduk miskin.

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan. Adapun profil kemiskinan di Kabupaten Sikka Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik 3.20 berikut ini:

Grafik 3.20
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Sikka Tahun 2023-2025



Gambar 3.1
Profil Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2025



Capaian Kinerja IKU Persentase Penduduk Miskin secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Persentase Penduduk Miskin dapat dilihat pada tabel 3.60 berikut:

Tabel 3.60
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU Persentase Penduduk Miskin

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Penduduk Miskin	%	11.69	11.25	102.46	AA	SM

- Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Persentase Penduduk Miskin dapat dilihat pada tabel 3.61 berikut ini:

Tabel 3.61
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Persentase Penduduk Miskin

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	Persentase Penduduk Miskin	%	11.69	12.56	11.89

- Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Persentase Penduduk Miskin sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.62 di bawah ini:

Tabel 3.62
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Persentase Penduduk Miskin sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	Persentase Penduduk Miskin	%	11.19	11.25	100.54

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa realisasi persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka tahun 2024 lebih tinggi sebesar 0.7 dari target dokumen PPMD Tahun 2024-2026 sebesar 11.19%.

- Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka, dengan Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT dan Persentase Penduduk Miskin Nasional dapat dilihat pada tabel 3.63 berikut ini:

Tabel 3.63
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Persentase
Penduduk Miskin Kabupaten Sikka, dengan Kabupaten Flores Timur,
Kabupaten Ende, Provinsi NTT dan Persentase Penduduk Miskin Nasional

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi	% Capaian Kinerja				
				Nasional	NTT	FLOTIM	ENDE	Kupang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penduduk Miskin	%	11.25	8.57	19.48	11.25	22.57	-

Berdasarkan tabel 3.63 diatas maka dapat dilihat bahwa Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka pada tahun 2025 masih di atas skala Nasional dan mempunyai skala yang sama dengan Kabupaten Flores Timur. Pada tahun 2025 Kabupaten Sikka masih ada *gap* sebesar 2.68% dengan persentase penduduk miskin Nasional. *Gap* tersebut tentunya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sikka untuk menurunkan persentase penduduk miskin.

Pemerintah Kabupaten Sikka berupaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah agar berdampak pada kesejahteraan Masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan Masyarakat, maka berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang sehingga terhindar dari kemiskinan. Dengan langkah-langkah mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan jaminan sosial, memberdayakan usaha ekonomi produktif keluarga dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan berbasis kawasan

(20) IKU : Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Tujuan ke-2 Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana tertuang dalam DPPMD 2024-2026 dengan sasarannya Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Memperoleh Bantuan Sosial, yang diukur melalui indikator kinerja utama, salah satu indikatornya adalah Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial adalah seseorang, kelompok maupun masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan wajar. Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada grafik 3.21 berikut ini :

Grafik 3.21
Persentase PPKS yang memperoleh bansos Tahun 2023-2025



Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah PPKS pada Tahun 2025 sebesar 97.26%, meningkat sebesar 43.26% terhadap Tahun 2023 dan meningkat sebesar 34.45%. Capaian Kinerja IKU Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilihat pada tabel 3.64 berikut:

Tabel 3.64
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan
kebutuhan dasar.

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	57.95	97.26	167.84	AA	SM

Dari tabel diatas tercatat bahwa realisasi Persentase PPKS Yang Memperoleh Bansos Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 39.31%. Dengan capaian kinerjanya sebesar 167.84%.

- Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Persentase PPKS Yang Memperoleh Bansos Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar, dapat dilihat pada tabel 3.65, berikut ini:

Tabel 3.65
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun
2024 Indikator Tujuan/ IKU Persentase PPKS Yang Memperoleh
Bansos Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	57.95	54.00	62.81

- Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Persentase PPKS Yang Memperoleh Bansos Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.66 berikut ini:

Tabel 3.66

Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	60.15	97.26	161.70

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa realisasi Persentase PPKS Yang Memperoleh Bansos Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kabupaten Sikka tahun 2024 telah melebihi target dokumen PPMD Tahun 2024-2026 sebesar 37.11%, dengan capaian kinerjanya sebesar 161.70%.

- Perbandingan Persentase PPKS Yang Memperoleh Bansos Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar tidak dilakukan terhadap Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dan Nasional sebab ketiadaan data.

Pemerintah Kabupaten Sikka berupaya untuk meningkatkan pelayanan, namun adanya hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar PPKS di luar panti dan kerjasama yang efektif dengan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
2. Kualitas data dan pengelola data PPKS
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarpras pelayanan publik

Solusi :

1. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dasar PPKS di luar panti dan kerjasama yang efektif dengan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
2. Perlu dilakukan verifikasi dan validasi data dan PPKS secara berkala

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan publik
4. Memanfaatkan anggaran, bantuan sosial, kerjasama antar perangkat pelayanan sosial dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial
5. Mengoptimalkan Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan fungsi tagana untuk meningkatkan keterampilan PPKS dan kesadaran masyarakat
6. Menyediakan SDM Pelayan PPKS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna memberikan informasi dan data yang berkualitas
7. Meningkatkan keterampilan PPKS dengan pelatihan

(21) IKU : IDM (Indeks Desa Membangun)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk :

- a. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai perkembangan desa;
- b. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;
- c. Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan desa dan lembaga yang ada.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu :

- a. Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

b. Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

c. Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

d. Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

e. Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan. Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- 1) Ketahanan Sosial : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
- 2) Ketahanan Ekologi : Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana

- 3) Ketahanan Ekonomi : Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedianya pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), dapat dilihat pada tabel 3.67 berikut ini:

Tabel 3.67
Rentang Nilai Indeks Desa Membangun

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	$IDM > 0.8155$
MAJU	$0.7072 < IDM \leq 0.8155$
BERKEMBANG	$0.5989 < IDM \leq 0.7072$
TERTINGGAL	$0.4907 < IDM \leq 0.5989$
SANGAT TERTINGGAL	$IDM \leq 0.4907$

Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator Kinerja Utama Indeks Desa Membangun, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Indeks Desa Membangun :

Jika dibandingkan dengan target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Desa Membangun sebesar 0,65 maka terjadi kenaikan sebesar 0,02. Capaian kinerja indeks ini sebesar 102.71%. Dari data ini terlihat bahwa terjadi peningkatan nilai IDM. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan status desa. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Desa Membangun, secara terperinci dapat dilihat pada tabel 3.68 berikut ini:

Tabel 3.68
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU Indeks Desa Membangun

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IDM (Indeks Desa Membangun)	Indeks	0.65	0.67	102.71	AA	SM

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU IDM (Indeks Desa Membangun), dapat dilihat pada tabel 3.69, berikut ini:

Tabel 3.69
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU IDM (Indeks Desa Membangun)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	IDM (Indeks Desa Membangun)	Indeks	0.65	0.64	0.65

Dari data di atas Realisasi IDM (Indeks Desa Membangun) tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0.03 poin jika dibandingkan dengan IDM (Indeks Desa Membangun) tahun 2023 dan mengalami peningkatan sebesar 0.02 poin jika dibandingkan dengan IDM (Indeks Desa Membangun) tahun 2024.

3. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU IDM (Indeks Desa Membangun) sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.70 di bawah ini:

Tabel 3.70
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU IDM (Indeks Desa Membangun) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	IDM (Indeks Desa membangun)	Indeks	0.66	0.67	101.15

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa realisasi IDM (Indeks Desa Membangun) tahun 2025 lebih tinggi 0.01 poin dari target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 sebesar 0.66%. Capaian kinerja IDM (Indeks Desa Membangun) sebesar 101.15%. Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik 3.22 berikut:

Grafik 3.22
Perkembangan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Sikka Tahun 2023-2025



4. Perbandingan IDM (Indeks Desa Membangun) tidak dapat dilakukan terhadap Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dan Nasional sebab ketiadaan data.

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama IDM (Indeks Desa Membangun) mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- 1) Adanya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dari Pemerintah Kabupaten Sikka, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang diberikan ke desa;
- 2) Status desa mandiri tidak mengurangi alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke desa;
- 3) Adanya koordinasi dalam pemutakhiran data Indeks Desa Membangun dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa;
- 4) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, untuk mengukur Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
- 5) Adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan ke Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Hal-hal yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka di tahun kedepan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa;
- 2) Melaksanakan penguatan kelembagaan BUMDesa;
- 3) Melaksanakan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan,
- 4) Melaksanakan peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

[182]

(22) IKU : Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah

Kesenjangan penduduk antar wilayah adalah perbedaan distribusi pendapatan dan pembangunan antar wilayah kesenjangan. Kesenjangan ini dapat terjadi pada aspek fisik, sosial dan ekonomi.

Capaian Indikator tujuan/Indikator Kinerja Utama Persentase Kesenjangan Penduduk Antar Wilayah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Persentase Kesenjangan Penduduk Antar Wilayah.

Pada tahun 2025 realisasi Persentase Kesenjangan Penduduk Antar Wilayah sebesar 14.33, lebih tinggi sebesar 1.33 dari target yang ditetapkan sebesar 13.00. Capaian kinerja indeks ini sebesar 89.77%. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Kesenjangan Penduduk Antar Wilayah, secara terperinci dapat dilihat pada tabel 3.71 berikut ini:

Tabel 3.71

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024
IKU Persentase Kesenjangan Penduduk Antar Wilayah

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Kesenjangan Penduduk Antar Wilayah	Nilai	13.00	14.33	89.77	AA	SM

2. Pada tahun 2025 tidak dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 Indikator Tujuan/IKU Persentase Kesenjangan Penduduk Antar Wilayah. Hal ini disebabkan karena Persentase Kesenjangan Penduduk Antar Wilayah tidak dihitung pada tahun 2023.
3. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Persentase Kesenjangan Penduduk Antar Wilayah sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.72 di bawah ini:

[183]

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) dapat dilihat pada tabel 3.77, dibawah ini:

Tabel 3.77

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	71.70	75.44	72.82

Dari data di atas Realisasi IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 5.22 poin jika dibandingkan dengan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) tahun 2023 dan mengalami peningkatan sebesar 7.84 poin jika dibandingkan dengan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) tahun 2024.

Perkembangan kinerja sasaran Terwujudnya kualitas Lingkungan Hidup diukur dengan indikator IKLH (Indeks Kualitas lingkungan Hidup) di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik 3.23 berikut:

Grafik 3.23

Perkembangan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Tahun 2023-2025



3. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.78 di bawah ini:

Tabel 3.78
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	IKLH (Indeks Kualitas lingkungan Hidup)	Indeks	73.81	80.66	109.28

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa realisasi IKLH (Indeks Kualitas lingkungan Hidup) tahun 2025 lebih tinggi 6.85 poin dari target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 sebesar 73.81 Capaian IKLH (Indeks Kualitas lingkungan Hidup) sebesar 109.28%.

4. Perbandingan IKLH (Indeks Kualitas lingkungan Hidup) tidak dilakukan terhadap Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dan Nasional sebab ketiadaan data.

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) mengalami keberhasilan. Namun demikian Pemerintah Daerah akan konsisten untuk Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, Peningkatan sarana dan prasarana persampahan, Mengoptimalkan fungsi Laboratorium Lingkungan Hidup, pengelolaan persampahan, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Penegakan Perda Pengelolaan Persampahan dan penerapan TPS3R guna

mendukung pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder

(25) IKU : Indeks Resiko Bencana



Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Pengurangan Indeks Resiko Bencana dengan indikator Kinerja Utama Indeks Resiko Bencana, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Indeks Resiko Bencana

Indeks resiko bencana Tahun 2025 berada pada skor 138.41 (Kategori Sedang) dari target skor 123.38 sehingga dapat dikatakan bahwa Indeks Resiko Bencana belum mencapai target, terdapat gap sebesar 15.03. Capaian kinerja indeks ini sebesar 112.18%. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Resiko Bencana, secara terperinci dapat dilihat pada tabel 3.79 berikut ini:

Tabel 3.79
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
tahun 2025 IKU Indeks Resiko Bencana

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Resiko Bencana)	Indeks	123.38	138.41	87.82	AA	SM

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Resiko Bencana dapat dilihat pada tabel 3.80, berikut ini:

Tabel 3.80

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Resiko Bencana

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	Indeks Resiko Bencana	Indeks	123.38	135.14	141.81

Dari data di atas realisasi Indeks Resiko Bencana tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 3.27 poin jika dibandingkan dengan Indeks Resiko Bencana tahun 2023 dan mengalami penurunan sebesar 3.4 poin jika dibandingkan dengan Indeks Resiko Bencana tahun 2024. Perhitungan Indeks Risiko Bencana seperti yang tertera dalam grafik diatas didasarkan pada rumus umum Risiko Bencana, yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni ancaman, kerentanan dan kapasitas. Dari tiga komponen diatas, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan representasi dari komponen kapasitas. Dengan asumsi bahwa jika kapasitasnya meningkat maka risiko bencana akan menurun.

3. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Indeks Resiko Bencana sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.81 di bawah ini:

Tabel 3.81

Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Indeks Resiko Bencana sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	117.68	138.41	82.38

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Resiko Bencana tahun 2025 masih lebih tinggi 20.73 poin dari target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 sebesar 117.68 Capaian Indeks Resiko Bencana sebesar 82.38%.

4. Perbandingan Indeks Resiko Bencana, dengan IRB Kabupaten Flores Timur, IRB Kabupaten Ende, IRB Kabupaten Kupang, IRB Provinsi NTT dan IRB Nasional dapat dilihat pada tabel 3.82 berikut ini:

Tabel 3.82

Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sikka dengan IRB Kabupaten Flores Timur dan IRB Kabupaten Ende

No	Indikator Kinerja Tujuan / Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi	% Capaian Kinerja Terhadap standar nasional/standar Daerah lain				
				Nasional	NTT	Flotim	Ende	Kupang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	138.41	-	-	122.18	131.19	-

Berdasarkan tabel 3.85 diatas maka dapat dilihat bahwa Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sikka pada tahun 2025 masih di atas skala Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Ende. Pada tahun 2025 Kabupaten Sikka masih ada gap sebesar 16.23 poin dengan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Flores Timur dan 7.22 poin dengan IRB Kabupaten Ende. Gap tersebut tentunya menjadi

perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sikka untuk menurunkan Indeks Resiko Bencana. Sedangkan IRB Kabupaten Kupang, IRB Provinsi NTT dan IRB Nasional tidak dapat dibandingkan sebab ketiadaan data.

Pemerintah Kabupaten Sikka telah berupaya untuk menekan nilai IRB dengan melakukan : langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan dalam bentuk Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (Desa / kelurahan tangguh bencana, Satuan Pendidikan aman bencana, Keluarga tangguh bencana, dan kecamatan tangguh bencana), mitigasi bencana, meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan masyarakat dan melakukan simulasi kebencanaa, serta menyusun rancangan awal Renkon kekeringan.

Upaya yang harus dilakukan kedepannya adalah Meningkatkan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan dalam bentuk Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (Desa/kelurahan tangguh bencana, Satuan Pendidikan aman bencana, Keluarga tangguh bencana, dan kecamatan tangguh bencana), mitigasi bencana, pemasangan rambu/papan informasi kebencanaan, meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, melakukan simulasi kebencanaan, melengkapi dokumen kebencanaan seperti KRB, RPB, FPKB, dan Renkon, serta melakukan penilaian risiko bencana termasuk pembuatan peta risiko bencana dan jalur evakuasi serta titik kumpul. Selain itu harus dilakukan peningkatan kualitas SDM penanggulangan bencana, peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana yg memadai.

(26) IKU : Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mencapai good and clean governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Sejak tahun 2023 telah ditetapkan kebijakan terbaru untuk peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, yaitu penguatan dampak dari implementasi Reformasi Birokrasi, melalui Reformasi Birokrasi Berdampak, sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. Sebagaimana peraturan dimaksud, Reformasi Birokrasi dibagi menjadi 2 (dua) komponen penilaian, yaitu :

1. Reformasi Birokrasi General, yang terbagi menjadi sub komponen penilaian sebagai berikut:
 - a. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
 - b. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
 - c. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - d. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
 - e. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - f. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - g. Tingkat Digitalisasi Arsip
 - h. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
 - i. Indeks Kualitas Kebijakan
 - j. Indeks Reformasi Hukum
 - k. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor
 - l. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang / Jasa
 - m. Indeks Sistem Merit
 - n. Indeks Pelayanan Publik
 - o. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
 - p. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - q. Opini BPK
 - r. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
 - s. Indeks BerAKHLAK

- t. Survei Penilaian Integritas
 - u. Survey Kepuasan Masyarakat
2. Reformasi Birokrasi Tematik, yang terbagi menjadi beberapa tematik sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut :
- a) Pengentasan Kemiskinan
 - b) Peningkatan Investasi
 - c) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dengan fokus Penanganan Stunting
 - d) Pengendalian Inflasi
 - e) Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sikka tahun 2024 telah tercapai memperoleh predikat B (Kategori Baik) dengan dari yang ditargetkan C (Kurang).

Capaian Indikator tujuan/Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Indeks Reformasi Birokrasi

Pada Tahun 2025 realisasi Indeks Reformasi Birokrasi mendapat Kategori B lebih tinggi sebdari target yang ditetapkan dengan kategori C. Capaian kinerja indeks ini sebesar 111.48%. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi, secara terperinci dapat dilihat pada tabel 3.83 berikut ini:

Tabel 3.83
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
tahun 2024 IKU Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	B	111.48	AA	SM

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel 3.84, berikut ini:

Tabel 3.84
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan
tahun 2023
Indikator Tujuan/ IKU Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	C	B

Dari data di atas Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 dan tahun 2024.

3. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Indeks Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.85 di bawah ini:

Tabel 3.85
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IIKU Indeks Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

N o	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	B	111.48

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 melebihi target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yaitu kategori CC dan Persentase Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 111.48%.

4. Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi tidak dilakukan terhadap Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT dan Nasional sebab ketiadaan data.

Beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sikka dalam upaya peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain:

1. Kurangnya kepemimpinan yang kuat.
Kepemimpinan yang kuat dan visioner sangat penting dalam mendorong implementasi reformasi birokrasi.
2. Keterbatasan sumber daya. Implementasi reformasi birokrasi membutuhkan sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia, teknologi, maupun keuangan.
3. Budaya dan sikap pegawai yang resisten terhadap perubahan. Pegawai yang enggan berubah dan tidak mendukung reformasi birokrasi dapat membuat implementasi reformasi birokrasi terhambat.
4. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja dan instansi. Implementasi reformasi birokrasi seringkali melibatkan banyak unit kerja

maupun instansi pemerintah yang harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain.

5. Masalah hukum dan regulasi. Reformasi birokrasi seringkali melibatkan perubahan pada regulasi dan peraturan.

Upaya peningkatan kualitas pelaksanaan RB kedepan, beberapa hal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka antara lain:

1. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sikka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sikka sebagai tindak lanjut dari Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023; .
2. Menyusun rencana aksi pembagian peran pada Unit Kerja/Perangkat Daerah untuk masing-masing tema sesuai Road Map Reformasi Birokrasi
3. Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis maupun pendampingan secara langsung berupa desk ataupun asistensi terkait implementasi RB pada Unit Kerja/Perangkat Daerah;
4. Mendorong peningkatan kinerja Perangkat Daerah dengan memasukkan nilai SAKIP, IPP, ZI dan RB sebagai komponen penilaian kinerja perangkat daerah untuk digunakan salah satu komponen pemberian reward and punishment
5. Mengintensifkan koordinasi antar unit kerja/perangkat daerah maupun dengan instansi pemerintah lainnya, sebagai upaya percepatan pelaksanaan RB.

(27) IKU : SAKIP

1. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama SAKIP tahun 2025.

Pada Tahun 2025 realisasi SAKIP sebesar 60.78 masuk kategori B, lebih tinggi sebesar 0.78 dari target yang ditetapkan sebesar 60.00 kategori B. Capaian kinerja ini sebesar 101.30%. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama SAKIP, secara terperinci dapat dilihat pada tabel 3.86 berikut ini:

Tabel 3.86

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU SAKIP

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAKIP	Nilai	B (60.00)	B (60.78)	101.30	AA	SM

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU SAKIP dapat dilihat pada tabel 3.87, berikut ini:

Tabel 3.87

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU SAKIP

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2024	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	SAKIP	Nilai	B	B	B

Dari data di atas Realisasi SAKIP tahun 2025 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan SAKIP tahun 2023 dan tahun 2024, karena tetap berada pada kategori B.

3. Perbandingan realisasi kinerja indikator tujuan/ IKU SAKIP sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.88 di bawah ini:

Tabel 3.88

Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU SAKIP sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

N o	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6

I	SAKIP	Nilai	BB (70.00)	B (60.78)	86.83
---	-------	-------	---------------	--------------	-------

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa realisasi SAKIP tahun 2025 60.78 masih lebih rendah 9.22 poin dari target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 sebesar 70.00 dengan capaian SAKIP sebesar 86.83%.

4. Perbandingan SAKIP terhadap Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dan Nasional.

Selanjutnya nilai SAKIP Kabupaten Sikka dengan nilai SAKIP Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT berada dalam kategori B, sedangkan nilai SAKIP Nasional tidak dapat dibandingkan sebab ketiadaan data.

(28) IKU : Opini BPK

1. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Opini BPK tahun 2025.

Pada Tahun 2025 realisasi Opini BPK mencapai target yang ditetapkan yaitu WTP. Capaian kinerja ini sebesar 100.00%. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Opini BPK, secara terperinci dapat dilihat pada tabel 3.89 berikut ini:

Tabel 3.89
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
tahun 2025 IKU Opini BPK

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100.00	AA	SM

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Opini BPK dapat dilihat pada tabel 3.90, berikut ini:

Tabel 3.90
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Opini BPK

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2024	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP

Dari data di atas Realisasi Opini BPK tahun 2025 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan OpiniBPK tahun 2023 dan tahun 2024, karena tetap berada pada realisasi yang sama, yaitu WTP.

3. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Opini BPK sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.91 di bawah ini:

Tabel 3.91
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Opini BPK sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

N o	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100.00

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa realisasi Opini BPK tahun 2025 mencapai target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yaitu WTP dengan capaian kinerja 100.00%.

4. Perbandingan Opini BPK terhadap Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dan Nasional.

Selanjutnya nilai Opini BPK Kabupaten Sikka dengan nilai Opini BPK Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT berada dalam realisasi yang sama, yaitu WTP, sedangkan nilai Opini BPK Nasional tidak dapat dibandingkan sebab ketiadaan data.

(29) Indeks Kualitas kebijakan Publik

Indeks kualitas kebijakan publik adalah alat ukur untuk menilai kualitas kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Tujuannya untuk mendorong partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan, mendorong prinsip-prinsip tata kelola yang baik, membangun kebijakan berbasis bukti, meningkatkan kinerja aparatur Negara dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sikka berdasarkan Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, bekerjasama dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusa Nipa. Indeks Kualitas Pelayanan Publik diperoleh dari hasil pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya

Capaian Indikator tujuan/Indikator Kinerja Utama Indeks kualitas kebijakan publik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Indeks kualitas kebijakan publik

Pada Tahun 2025 realisasi Indeks kualitas kebijakan publik sebesar 52.65, lebih tinggi sebesar 50.47 dari target yang ditetapkan sebesar 2.18. Capaian kinerja indeks ini sebesar 2.415%. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks kualitas kebijakan publik, secara terperinci dapat dilihat pada tabel 3.92 berikut ini:

Tabel 3.92
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
IKU Indeks Kualitas Kebijakan Publik

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Indeks	2.18	52.65	2.415	AA	SM

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Kualitas Kebijakan Publik dapat dilihat pada tabel 3.93, berikut ini:

Tabel 3.93
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan
tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU Indeks Kualitas Kebijakan
Publik

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Indeks	2.18	2.43	2.43

Dari data di atas Realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Publik tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 50.22 poin jika dibandingkan dengan Indeks Kualitas Kebijakan Publik tahun 2023 dan tahun 2024.

3. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Indeks Kualitas Kebijakan Publik sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.94 di bawah ini:

Tabel 3.94
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Indeks
Kualitas Kebijakan Publik sampai dengan tahun 2025 dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan
Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	Indeks Kualitas kebijakan Publik	Indeks	2.28	52.65	2.309

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Publik tahun 2025 melebihi 50.37 poin dari target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 sebesar 2.28 dan Persentase Capaian Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Publik sebesar 2.309%.

4. Perbandingan Indeks Kualitas Kebijakan Publik tidak dilakukan terhadap Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kupang, Provinsi NTT dan Nasional sebab ketiadaan data.

Upaya yang dilakukan kedepannya adalah memperkuat sistem informasi pelayanan publik, meningkatkan efektivitas konsultasi dan pengaduan, meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dan menciptakan inovasi pelayanan publik. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana, kapasitas SDM Aparatur dan penguatan regulasi.

(30) IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2024 dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, bekerjasama dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusa Nipa. Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya

Capaian Indikator tujuan/Indikator Kinerja Utama Survey Kepuasan Masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Survey Kepuasan Masyarakat.

Pada Tahun 2025 realisasi Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 3.33, lebih rendah sebesar 0.17 dari target yang ditetapkan sebesar 3.00. Capaian kinerja indeks ini sebesar 95.14%. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Survey Kepuasan Masyarakat, secara terperinci dapat dilihat pada tabel 3.95 berikut ini:

Tabel 3.95
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 IKU Survey Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.50	3.33	95.14	AA	SM

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/IKU Survey Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.96, di bawah ini:

Tabel 3.96
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2024 Indikator Tujuan/ IKU IKM Survey Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target tahun 2024	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.50	3.33	3.33

Dari data di atas Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2025 tidak mengalami peningkatan/penurunan jika dibandingkan dengan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan tahun 2024.

3. Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/ IKU Survey Kepuasan Masyarakat sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.97 di bawah ini.

Tabel 3.97
Perbandingan realisasi kinerja Indikator tujuan/
IKU Survey Kepuasan Masyarakat sampai dengan tahun 2025
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir DPPMD 2024-2026	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
I	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.70	3.33	90.00

Berdasarkan tabel 3.98 di atas, maka dapat dilihat bahwa realisasi Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2025 belum mencapai target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 . Masih perlu 0.37 poin untuk mencapai target. Persentase Capaian Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 90.00%.

4. Perbandingan Indeks Kualitas Kebijakan Publik tidak dilakukan terhadap Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT dan Nasional sebab ketiadaan data.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.98
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja sasaran	Satuan	capaian Indikator Tujuan/Indikator Kinerja sasaran (IKU)			capaian kinerja anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10
1	IPM	Indeks	67,00	73,37	109,51				125,74
2	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	8,87	9,39	105,86				121,55
3	HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15,51	16,17	104,26	1.984.708.731	1.728.491.580	87,09	119,71
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	13,00	48,66	374,31				429,79
5	UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	68,02	74,24	109,14	121.987.647.338	94.160.417.052	77,18	141,41
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,45	2,33	147,64	7.996.252.434	7.630.072.742	95,42	154,73
7	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	89,20	66,73	74,81				134,35
8	IDG (Indeks Development Gender)	Indeks	62,57	89,87	143,63	7.488.086.382	4.169.479.443	55,68	257,95
9	TFR (Total Fertility Rate)	angka	2,58	2,19	84,88				152,45
10	Rasio konsumsi normalif terhadap produksi bersih	Nilai Rasio	0,53	1,18	222,64	1.216.029.711	1.203.146.760	98,94	225,03

Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Indeks	0,65	0,67	103,08	506.872.768	194.197.067	38,31	269,04
21 IDM (Indeks Desa Membangun)	Indeks							
22 Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah	Nilai	13,00	14,33	89,77	42.084.367.480	35.320.831.627	83,93	106,96
23 IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	Indeks	57,81	56,79	98,58				117,45
24 IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	71,70	80,66	112,50	9.134.019.280,00	9.116.831.852	99,81	112,71
25 Indeks Resiko Bencana	Indeks	123,38	138,41	112,18	816.253.290	386.549.900	47,36	236,89
26 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	B	111,48				139,58
27 SAKIP	Kategori	B	B	101,30	5.509.364.520	4.397.157.793	79,81	-
28 Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	17.236.534.461	15.968.147.687,78	92,64	-
29 Indeks Kualitas kebijakan Publik	Indeks	2,18	52,65	2415,14	50.425.563.615	48.601.770.488	96,38	2505,77
30 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	3,50	3,33	95,14	680.192.070.495,13	635.448.614.616,36	93,42	101,84

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.99

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja/ Tujuan /KU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING SDM							
1	IPM	109,51						
	1. Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat							
2	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	104,68						
3	HLS (Harapan Lama Sekolah)	104,26						
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (PLM)	347,31						

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum mulok bahasa dan sastra daerah	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 25,20 masuk pada kriteria Sangat Rendah	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja/ Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 90,58 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Persentase	86,14	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 86,14 masuk pada kriteria Tinggi dan capaian keuangan sebesar 96,07 masuk pada kriteria Sangat	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujasn /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/ Kegiatan/output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Tinggi	
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi kelayakan operasional	Persentase	-	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 0,00 dan capaian keuangan sebesar 9,00 masuk pada kriteria Sangat Rendah	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/ Kegiatan/output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persentase	58,72	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 58,72 dan capaian keuangan sebesar 52,47 masuk pada kriteria Rendah	Tidak Menunjang
	2. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat							
5	UHH (Usia Harapan Hidup)	109,73						

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usan/Bidang Usan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Saluan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase	72,63	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 72,63 masuk pada kriteria Sedang dan capaian keuangan sebesar 77,75 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	78,42	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 78,42 dan capaian keuangan sebesar 66,49 masuk pada kriteria Sedang	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan/output	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 94,57 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Persentase	90,97	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 90,97 masuk pada kriteria Tinggi dan capaian keuangan sebesar 92,75 masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/ Kegiatan/output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase	88,32		
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	121,00		
	3. Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran							
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	147,64						

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase	68,57	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 68,57 masuk pada kriteria Sedang dan capaian keuangan sebesar 92,21 masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Tidak Menunjang
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	209,05	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 209,05 masuk pada kriteria sangat tinggi dan capaian keuangan sebesar 22,83 masuk pada	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja/ Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							kriteria Sangat Rendah	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang dilempatkan di Lokasi Transmigrasi	Persentase	20.00	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 20.00 masuk pada kriteria Sangat Rendah dan capaian keuangan sebesar 98.58 masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Tidak Menunjang

No	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja/ Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Sasaran Meningkatnya kesetaraan, keadilan Gender dan Kualitas Keluarga							
7	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74,61						
8	IDG (Indeks Development Gender)	143,63						
9	TFR (Total Fertility Rate)	84,88						
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 79,08 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/ Kegiatan/output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprensensif	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 98,92 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pembelajaran Keluarga	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 87,85 masuk	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja/ Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan/output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							pada kriteria Tinggi	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 97,90 masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 87,92 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 56,07 masuk pada kriteria Rendah	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 91,26 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
	5. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat							
10	Rasio konsumsi normal/ terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	141,07						

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 72,17 masuk pada kriteria Sedang	Menunjang
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 59,59 masuk pada kriteria Rendah	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan keamanan pangan	Persentase	100.00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 55.40 masuk pada kriteria Rendah	Menunjang
6. Sasaran Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah								
11	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	133.33						
12	Indeks Inovasi Daerah	75.92						

No	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan/output	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	90,73						
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Jumlah Inovasi Daerah Yang Dilaporkan	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 88,20 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang
	7. Sasaran Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olahraga							
14	Persentase pemuda pelopor	82,00						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase		Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk	Tidak Menunjang

No	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							capaian kinerja sebesar 0,00 dan capaian keuangan sebesar 19,11 masuk pada kriteria Sangat Rendah	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Perolehan Prestasi di bidang Olahraga	Persentase	50,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 50,00 masuk pada kriteria Rendah dan capaian keuangan sebesar 94,22 masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja/ Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase	100,00	Sesuai dengan pemilihan peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 100 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
B	TUJUAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
15	Pengeluaran Per Kapita	8219,00						
	1. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi							
16	Pertumbuhan Ekonomi	105,94						
17	Jumlah Nilai Investasi	29,55						

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja/ Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemennintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Derajat Desentralisasi/ Fiskal	97,98						
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 79,91 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Persentase	50,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 50,00 dan capaian keuangan sebesar 93,94 di	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase jenis izin yang dilayani	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 97,58 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome) Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	Persentase	33,33	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 33,33 dan capaian keuangan sebesar 99,96 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Tidak Menunjang
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,86 di kategorikan masuk pada kriteria	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sangat Tinggi	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 78,05 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 56,08 masuk pada kriteria Rendah	Menunjang
			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 85,76 masuk	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							pada kriteria Tinggi	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Berkembangnya Pemanfaatan Sumberdaya Industri Daerah dalam Mendukung Sektor Industri Tahun 2021	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 18,80 masuk pada kriteria	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sangat Rendah	
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatkan Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	Persentase	100.00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 77.09 masuk pada kriteria	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Tinggi	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tersedianya barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 95,72 di kategori masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan IKLU	% Capaian Kinerja	Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Persentase	72,73	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja kinerja untuk capaian kinerja sebesar 72,73 masuk pada kriteria Sedang dan capaian keuangan sebesar 19,64 masuk pada kriteria Sangat Rendah	Menunjang
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan pengelolaan perikanan tangkap	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100,00 dan capaian keuangan sebesar 99,00 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /KU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Tinggi	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	Persentase	-	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 0,00 dan capaian keuangan sebesar 0,00 masuk pada kriteria Sangat Rendah	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Persentase	77,23	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 79,83 masuk pada kriteria Tinggi dan capaian keuangan sebesar 37,50 masuk pada kriteria Sangat Rendah	Menunjang
			Program Penyediaan dan Pembangunan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pembangunan Sarana Pertanian	Persentase	90,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 90,00 masuk pada kriteria Tinggi dan capaian keuangan sebesar	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							66,23 masuk pada kriteria Sedang	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 7,25 masuk pada kriteria Sangat Rendah	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase	100.00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 97.09 masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
			Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	-		

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Petani	Persentase	96,35	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 96,35 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 29,52 masuk pada kriteria Sangat Rendah	Menunjang
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	TERSELENGGARANYA PEMASARAN PARIWISATA	Persentase	77,78	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 77,78 masuk pada kriteria Tinggi dan capaian keuangan sebesar 99,44 masuk pada kriteria	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /KU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/ Kegiatan/output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sangat Tinggi	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	TERSELENGGARANYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase	99.40	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 99.40 masuk pada kriteria Tinggi dan capaian keuangan sebesar 7.65 masuk pada kriteria Sedang	Menunjang
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Persentase	100.00	Sesuai dengan penilaian	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 44,40 masuk pada kriteria Sangat Rendah	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	TERSELENGGARANYA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase	94,44	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 94,44 dan capaian keuangan sebesar 95,93 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	TERSELENGGARANYA PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 100 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
19	2. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan							
	Persentase Penduduk Miskin	96,24						

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 86,46 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 74,24 masuk pada	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							kriteria Sedang	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,93 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 25,36 masuk	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							pada kriteria Sangat Rendah	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase	64,09	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 64,09 masuk pada kriteria Rendah dan capaian keuangan sebesar 12,62 masuk pada kriteria Sangat Rendah	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja/ Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase	157,16	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 157,16 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 90,00 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya SDM Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 52,17 masuk	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							pada kriteria Rendah	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigrasi yang ditempatkan di Lokasi Transmigrasi	Persentase	20,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 20,00 masuk pada kriteria Sangat Rendah dan capaian keuangan sebesar 98,68 masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	3. Sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)							
	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	167.84						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS	Persentase	39.49	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 39.49 masuk pada kriteria Sangat Rendah dan capaian keuangan sebesar 98.00 masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usan/Bidang Usan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS	Persentase	110,42	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 110,42 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 75,45 masuk pada kriteria Sedang	Menunjang
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	Persentase	36,00	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 36,00 masuk pada kriteria Sangat Rendah dan capaian keuangan sebesar 41,61 masuk pada kriteria	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Rendah	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Korban Bencana Persentase korban bencana alam dan sosial dar/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persentase	117,54	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 117,54 dan capaian keuangan sebesar 92,81 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	4. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat							
	IDM (Indeks Desa Membangun)	102,71						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Peningkatan Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif Dan Pemberdayaan	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 98,96 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE CAPAIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA YANG DILAKSANAKAN	Persentase	87,21	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 87,21 masuk pada kriteria Tinggi dan capaian keuangan sebesar 92,80 masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait penataan desa	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,84 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Tinggi	
III	TUJUAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS LINGKUNGAN							
22	Perbedaan (Defiasi) Penduduk Miskin Antar Wilayah	89,77						
23	1. sasaran Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial							
	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	100,91						
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	Persentase	-	Sesuai dengan penilaian	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /KU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	8
							peringkat kinerja, tidak terrealisasi capaian kinerja dan capaian keuangan	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Persentase	71,43	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 71,43 dan capaian keuangan sebesar 75,21 di kategori masuk pada kriteria Sedang	Tidak Menunjang
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persentase	-	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja, tidak terrealisasi capaian kinerja dan capaian keuangan	Tidak Menunjang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase	100,00	Sesuai dengan	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			SISTEM AIR LIMBAH				penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 70.48 masuk pada kriteria Sedang	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	-	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja, tidak terrealisasi capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 11.84 masuk pada kriteria Sangat Rendah	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	Persentase	266,67	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 266,67 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 79,36 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	92,24	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 92,24 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 77,02 masuk	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							pada kriteria Tinggi	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Teknis/Terampil	Persentase	67,74	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 67,74 masuk pada kriteria Sedang dan capaian keuangan sebesar 52,47 masuk pada kriteria Rendah	Tidak Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap	Persentase	470,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 470,00 masuk pada kriteria	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja/ Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 80,12 masuk pada kriteria Tinggi	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase	103,57	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 103,57 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 12,62 masuk pada kriteria Sangat Rendah	Menunjang
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota difangani	Persentase	-	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja, tidak terrealisasi	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja/ Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Prekikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							capaian kinerja dan capaian keuangan	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LJAJ)	Persentase Jumlah Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan yang dilaksanakan	Persentase	98,91	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 98,91 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 93,46 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja/ Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Saluan	Persentase Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99.43 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
24	2. Sasaran Terwujudnya kualitas lingkungan hidup							
	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	112.50						
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							sebesar 99,73 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Persentase Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase	111,04	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 95,11 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Saluan	Persentase Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase RTH	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 97,76 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,77 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase	156,36	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 156,36 dan capaian keuangan sebesar 97,05 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	88,24	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 88,24 dan capaian keuangan sebesar 98,65 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase	182,50	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 182,50 dan capaian keuangan sebesar 97,97 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang Terangani	Persentase	65,15	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 65,15 masuk pada kriteria Rendah dan capaian keuangan sebesar 95,34 masuk pada kriteria Sangat	Tidak Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan/output	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Tinggi	
	3. Sasaran Terwujudnya pengurangan resiko bencana							
25	Indeks Resiko Bencana	112,18						
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 77,25 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	TUJUAN MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN							
26	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00						
	1. Sasaran Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan							
27	SAKIP	100,00						
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kepegawaian Daerah	Persentase	97,26	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 92,31 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 90,65 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	8
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 88,76 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 92,59 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sika Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase	99,73	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 99,73 dan capaian keuangan sebesar 99,81 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase	96,38	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 96,38 dan capaian keuangan sebesar 99,75 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset							
28	Opini BPK	100.00						
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan Keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase	95.53	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 95.53 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 83.04 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja/ Tujuan AKU	% Capaian Kinerja	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan Barang Milik daerah yang akuntabel	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 83,81 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang
	3. Sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan public							
29	Indeks Kualitas kebijakan Publik	2415,14						
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja/ Tujuan IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 93,81 masuk pada kriteria Sangat Tinggi	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian perangkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 92,26 masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian perangkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikika Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							dan capaian keuangan sebesar 98,26 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase pengamanan data dan konten informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	Persentase	98,15	Sesuai dengan penilaian peningkatan kinerja untuk capaian kinerja sebesar 98,15 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 99,62 masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peningkatan kinerja untuk capaian	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 98,22 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,70 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,76 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 98,35 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran (RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik Sosial	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 61,56 masuk pada kriteria Rendah	Menunjang
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelayanan pemerintahan dan kejahteraan rakyat	Persentase	88,41	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 88,41 masuk pada kriteria Tinggi dan capaian keuangan sebesar 65,06 masuk pada kriteria	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Rendah	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persentase	75,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 75,00 dan capaian keuangan sebesar 79,15 di kategorikan masuk pada kriteria Tinggi	Tidak Menunjang
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase	140,91	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 140,91 dan capaian keuangan sebesar 94,07 di kategorikan masuk pada	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							kriteria Sangat Tinggi	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	83,33	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 83,33 masuk pada kriteria Tinggi dan capaian keuangan sebesar 93,46 masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
	4. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik							
30	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	95,14						

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,93 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen catatan Sipil bagi masyarakat	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 94,69 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI/ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan untuk stake holder	Persentase	67,86	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 67,86 masuk pada kriteria Sedang dan capaian keuangan sebesar 94,70 masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Tidak Menunjang
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data profil kependudukan yang disusun	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,85 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Waktu tanggap	Persentase	85,71	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 85,71 dan capaian keuangan sebesar 79,19 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Tritibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Rendah dan capaian keuangan sebesar 97,89 masuk pada kriteria Sangat Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja/ Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran tugas	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 88,64 dan capaian keuangan sebesar 79,83 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 88,45 dan capaian keuangan sebesar 79,86,13 masuk pada kriteria Tinggi	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja/ Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 91,40 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 60,46 masuk pada kriteria Rendah	Menunjang
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase	100,00	Sesuai dengan penilaian peningkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 95,95 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 83,83 masuk	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator Kinerja Tujuan /IKU	% Capaian Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024	Predikat Kinerja dan Keterangan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							pada kriteria Tinggi	

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Dokumen LKjIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan informasi atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Sikka untuk meningkatkan kinerjanya. Mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024- 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, dan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024, serta Perjanjian Kinerja Bupati Sikka Tahun 2025, kami sajikan realisasi yang telah diperjanjikan, analisis ketercapaian kinerja, upaya perbaikan ke depannya, serta program yang mendukung ketercapaian sasaran dan dilengkapi dengan tingkat efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yang diharapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa pencapaian dari 4 tujuan dengan 4 Indikator Tujuan, 2 indikator telah tercapai dengan nilai capaian 100% keatas dan 2 indikator belum tercapai atau dengan nilai dibawah 100%. Namun demikian secara keseluruhan indikator tujuan tersebut masih masuk dalam kategori Sangat Baik atau dengan nilai 189.29%, dan jika dirata-rata capaian kinerja dari 4 indikator tersebut sebesar 79.99%. Sedangkan secara keseluruhan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja sasaran dinilai Sangat Memuaskan, 22 (dua puluh dua) indikator kategori sangat memuaskan, 2 (dua) indikator dalam kategori memuaskan, 2 (dua) indikator dalam kategori sangat baik. Dan jika dirata-rata capaian kinerja dari 30 indikator tersebut sebesar 189.29%. Dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran sesuai tujuan Kabupaten Sikka pada tahun 2025, telah didukung dengan anggaran sebesar Rp.270.243.986.520 dan terealisasi sebesar Rp.250.482.863.784 atau tercapai 92.69% yang terbagi dalam 116 Program kegiatan. Dengan demikian jika

dibandingkan dengan capaian rata-rata kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 189.29%, maka didapat efisiensi sumber daya anggaran sebesar 7,31% sehingga dapat disimpulkan bahwa program-program tersebut sangat mendukung ketercapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

4.2. TINDAKLANJUT

Adapun dari indikator sasaran yang sudah tercapai dengan kategori Sangat Memuaskan dan Memuaskan akan di pertahankan dan ditingkatkan kedepannya, sedangkan pada pencapaian target kinerja dengan kategori kurang akan dilakukan perbaikan dan evaluasi untuk peningkatan di tahun akan datang.

Maumere, Maret 2026

Wakil Bupati Sikka



SIMON SUBANDI SUPRIADI